2023

LKj IP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 35

A. Capaian Kinerja Organisasi 35

B. Realisasi Anggaran 135

BAB IV PENUTUP 139

NB: LKjIP telah sesuai dengan sistematika dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Umum

Dengan terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam tata pemerintahan pada saat ini, maka upaya untuk mencapai pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi, dimana di era disrupsi (perubahan yang terjadi dengan cepat di setiap aspek kehidupan) yang ditandai dengan perkembangan digitalisasi informasi yang sangat cepat, pemerintahan dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik lebih baik. Optimalisasi pelayanan pemerintahan berbasis digitalisasi teknologi informasi diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Proses tersebut dapat bejalan semakin masif dengan menerapkan kolaborasi lintas fungsi pemerintah daerah.

Dalam implementasinya, tingkat kecepatan dan ketepatan pelayanan publik pemerintah daerah dipengaruhi oleh kesiapan perangkat daerah dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan kepala daerah berbasis tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perangkat daerah menjabarkan visi misi kepala daerah (RPJMD) ke dalam dokumen perencanaan Rencana Strategik (Renstra), dimana didalamnya terdapat indikator dan target tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah. Penyusunan indikator dan target tersebut dilaksanakan dengan metode SMART, yaitu *Specific* (sasaran kinerja harus bersifat spesifik), *Measurable* (sasaran kinerja yang disusun dapat diukur), *Achieveable* (target yang ditetapkan dapat dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia), *Relevant* (sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab perangkat daerah), dan *Time-bound* (sasaran kinerja yang disusun memiliki target waktu yang jelas).

Selanjutnya Renstra perangkat daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja). Perangkat daerah melaksanakan penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja setiap tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan amanat Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam evaluasi SAKIP yakni pra-evaluasi, evaluasi mendalam, dan penyampaian hasil.

Fokus evaluasi SAKIP perangkat daerah secara garis besar terdapat 3 (tiga) kriteria. Pertama, tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor-sektor prioritas pembangunan daerah. Kedua, perjenjangan kinerja instansi pemerintah. Ketiga, pelaksanaan evaluasi internal memberikan dampak bagi perbaikan implementasi SAKIP pada perangkat daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan. BPKAD Kabupaten Blitar telah melaksanakan proses perencanaan kinerja perangkat daerah dengan menyusun Renstra Tahun 2021-2026 dan menyusun Renja Tahun 2023. Melalui tema RKPD Tahun 2023: PEMBANGUNAN SDM DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN BERBASIS KAWASAN, BPKAD Kabupaten Blitar menetapkan prioritas program dan kegiatannya pada pemantapan tata kelola pemerintahan di bidang keuangan daerah. Hal tersebut sebagai upaya BPKAD Kabupaten Blitar mewujudkan capaian visi misi kepala daerah dengan pengoptimalan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, maka BPKAD Kabupaten Blitar menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas capaian sasaran strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023 bertujuan untuk: (1) Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, (2) Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur, (3) Meningkatkan kerja sama/ kolaborasi antar bidang/ lintas fungsi, dan (4) Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di masa mendatang pascaevaluasi pelaksanaan SAKIP.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang keuangan, maka kelembagaan BPKAD Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut, BPKAD Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah dengan klasifikasi kelembagaan Tipe A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka BPKAD Kabupaten Blitar mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKAD Kabupaten Blitar.

Dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 Hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2021, maka susunan organisasi BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Anggaran, membawahi:
   a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
   b. Sub Bidang Penganggaran dan Evaluasi Anggaran; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
   a. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
   b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi:
   a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah;
   b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Akuntansi, membawahi:
   a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
   b. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelayanan Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan 1.2.1

Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Blitar

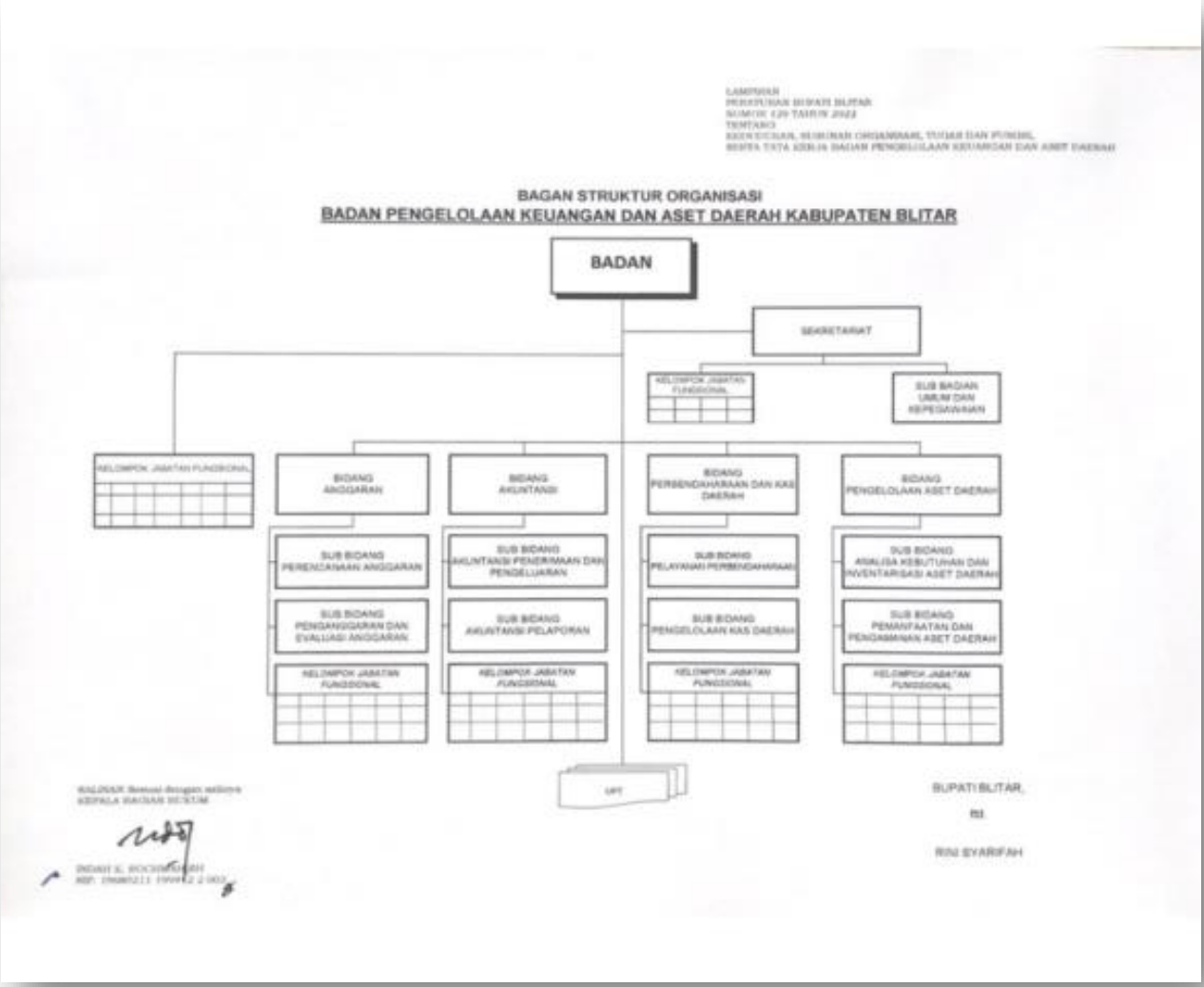

Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BPKAD Kabupaten Blitar dititikberatkan untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021-2026, khususnya misi ke-3 yaitu **"Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas".** Saat ini, BPKAD Kabupaten Blitar didukung oleh 44 Orang PNS. Dengan didasari atas keberagaman komposisi kepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (gender), golongan maupun tingkat pendidikan. Penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi BPKAD Kab. Blitar secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

Dilihat dari tingkat eselonnya, di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar terdapat 1 orang eselon II , Eselon III sebanyak 5 orang. Sedangkan jumlah Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana secara berturut-turut sebesar 9 orang, 5 orang dan 24 orang.

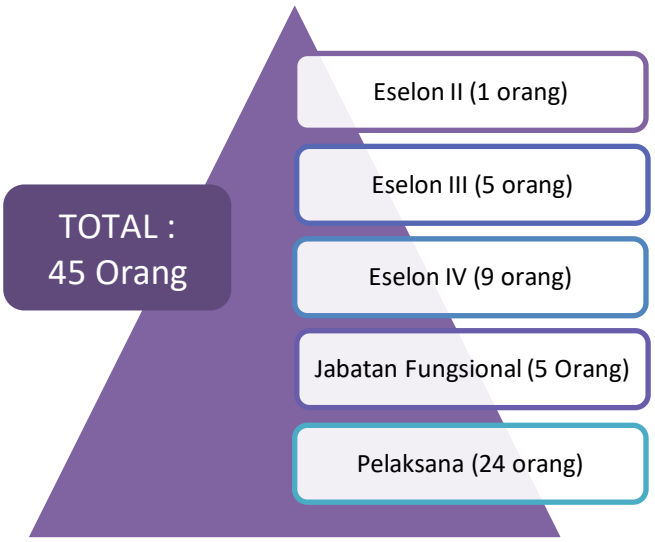

Tabel 1.2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Eselonisasi

No	Kelompok Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II b	1	-	**1**
2.	Eselon III a	-	1	**1**
3.	Eselon III b	2	2	**4**
4.	Eselon IV a	7	2	**9**
5.	Jabatan Fungsional	3	2	**5**
6.	Jabatan Pelaksana	9	15	**24**
	TOTAL	**22**	**22**	**44**

Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Dilihat dari tingkat golongannya, sebagian besar pegawai BPKAD Kabupaten Blitar berada di golongan III, yaitu sebanyak 30 orang. Sedangkan jumlah pegawai dengan golongan II dan IV secara berturut-turut sebesar 10 orang dan 4 orang.

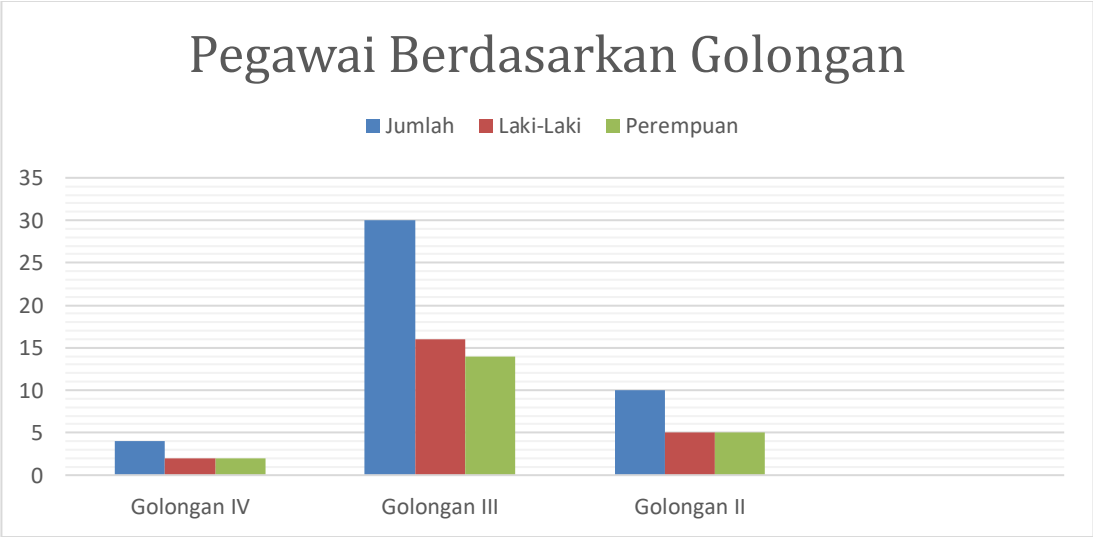

Tabel 1.2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Golongan

No	Kelompok Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	2	2	**4**
2.	Golongan III	15	15	**30**
3.	Golongan II	5	5	**10**
4.	Golongan I	-	-	**-**
	TOTAL	**22**	**22**	**44**

Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Dilihat dari stuktur komposisi usia, pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar masih tergolong dalam usia produktif, dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh kelompok Generasi X (usia lebih dari 40 tahun) yaitu sebanyak 26 pegawai (25,27%). Pegawai dari kelompok Generasi Millenial (lebih dari 30 tahun kurang dari 40 tahun) berjumlah 9 pegawai (20,45%), Kelompok Baby Boomers berjumlah 3 pegawai (6,82%) dan Kelompok Generasi Z berjumlah 9 pegawai (20,45%)

Dengan postur SDM yang demikian, diharapkan managemen pengelolaan SDM di BPKAD Kabupaten Blitar mampu menciptakan sumber daya yang inovatif untuk mendukung kemajuan organisasi.

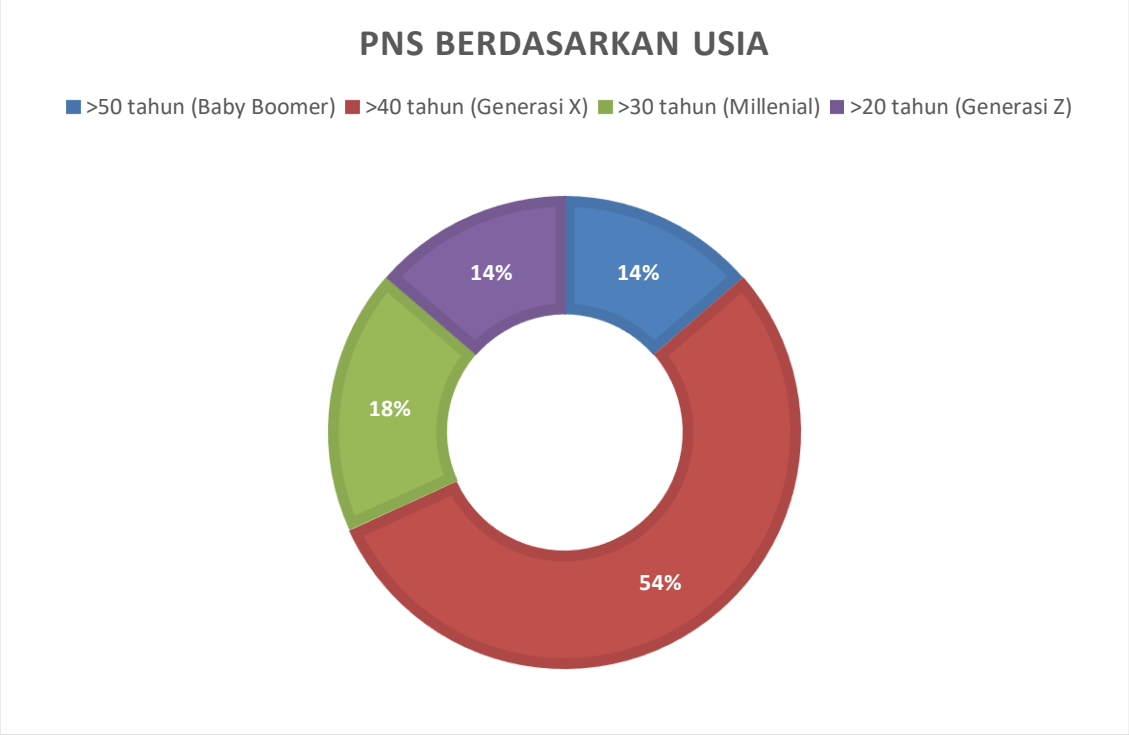

Tabel 1.2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	> 50 tahun (BB)	1	3	**4**
2.	> 40 tahun (X)	12	10	**22**
3.	> 30 tahun (Mill)	3	3	**6**
4.	> 20 tahun (Z)	3	6	**9**
	TOTAL	**22**	**22**	**44**

Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari struktur tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai BPKAD Kabupaten Blitar telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data kepegawaian per November 2022, sebanyak 16 pegawai (36%) dari total jumlah pegawai BPKAD Kabupaten Blitar (45 orang) telah memperoleh pendidikan S2; sebanyak 17 pegawai (38%) telah memperoleh pendidikan S1; sebanyak 2 pegawai (4%) berpendidikan DIII, sementara yang lainnya sebanyak 10 pegawai (22%) memiliki pendidikan SMA/ DI ke bawah.

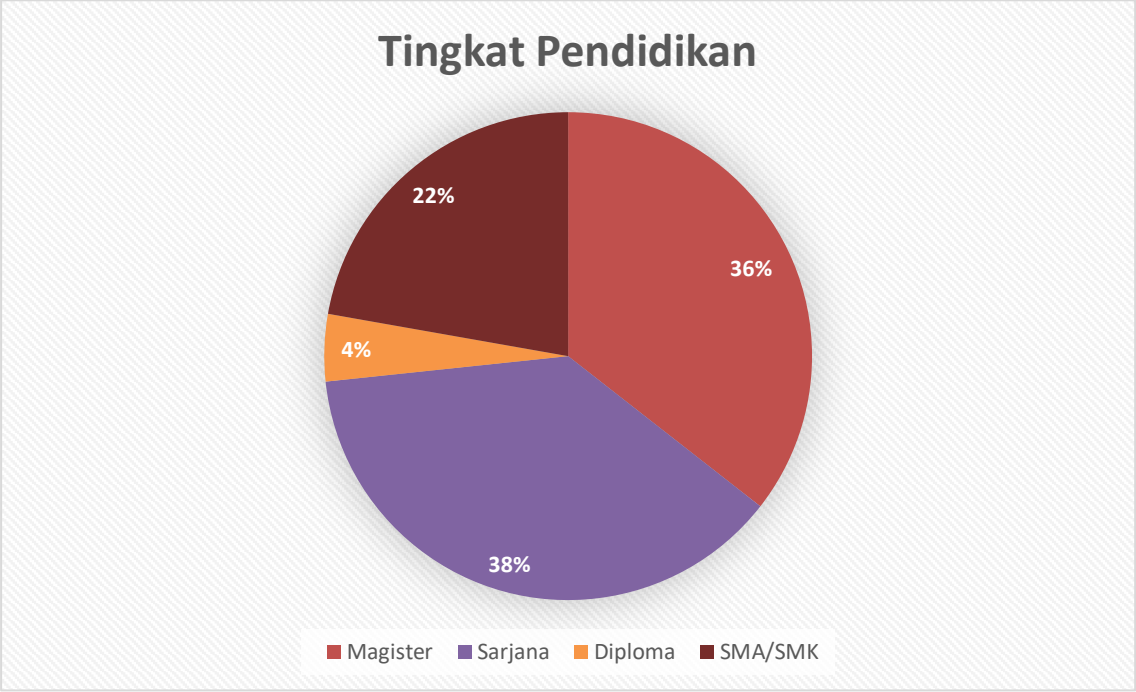

Tabel 1.2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-2	6	6	**12**
2.	S-1	9	8	**17**
3.	Diploma	2	3	**5**
4.	SMA/ SMK	5	5	**10**
	TOTAL	**22**	**22**	**44**

Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada BPKAD Kabupaten Blitar, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan PNS sebanyak 63 orang, yang terdiri dari 15 pejabat struktural 7 Pejabat Fungsional dan 41 pelaksana.

Sarana Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada BPKAD Kabupaten Blitar didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadahi. Aset pada BPKAD Kabupaten Blitar terbagi dalam bidang barang, yaitu (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi, Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, (6) Aset Tak Berwujud.

Barang Milik Daerah (BMD) tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada BPKAD Kabupaten Blitar, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten

Blitar selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi. Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada BPKAD Kabupaten Blitar sebagaimana pada **Tabel 1.2.5** dan **Tabel 1.2.6**

Tabel 1.2.5
Data Sarana dan Prasarana pada BPKAD Kabupaten Blitar
(Kondisi per Desember 2023)

NO	JENIS ASET	NILAI	KET.
1	Tanah	80.197.411.015,00	
2	Peralatan dan Mesin	7.614.734.224,97	
3	Gedung dan Bangunan	23.516.330.842,00	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	397.079.150,00	
5	Aset Lainnya	615.188.500,00	
	Jumlah	**111.725.555.231,97**	

Sumber Data : Data BMD BPKAD Kab. Blitar, 2023

Tabel 1.2.6
Daftar Perlengkapan BPKAD Kabupaten Blitar

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1.	Sepeda Motor Roda Dua	26 Unit	
2.	Mesin Foto Copy	1 Unit	
3.	AC Split	15 Unit	
4.	Kipas angin	4 Unit	
5.	PC Unit	38 Unit	
6.	Laptop	22 Unit	
7.	Tablet	4 Unit	
8.	Printer	55 Unit	
9.	Scaner	4 Unit	
10.	Server	1 Unit	
11.	Meja Kerja	38 Unit	
12.	Meja Rapat	1 Set	
13.	Kursi Kerja	60 Unit	
14.	Kursi Rapat	37 Unit	
15.	Kursi Tamu	3 Set	
16.	Proyektor	8 Unit	

17.	Layar Slide	2 Unit	
18.	Telepon	4 Unit	
19.	Faximile	1 Unit	
21.	Monitor	23 Unit	
22.	Hub	2 Unit	
23.	Jaringan	2 Set	
24.	Tustel	2 Unit	
25.	Mesin Hitung	22 Unit	
26.	Mesin Ketik Manual	1 Unit	
27.	GPS	2 Unit	
28.	Mobil Roda 4	1 Unit	
29.	Mesin Foto Copy	1 Unit	
30.	Lemari	6 Unit	
31.	Rak Besi	2 Unit	
32.	Filling Cabinet	15 Unit	
33.	Brangkas	2 Unit	
34.	Lemari Kaca	11 Unit	
35.	Alat Penghancur Kertas	3 Unit	
36.	Lemari Es	2 Unit	
37.	Jam Elektronik	7 Unit	
38.	Waterpump	3 Unit	
39.	Mesin Potong rumput	4 Unit	
40.	Televisi	3 Unit	
41.	Sound system	7 Unit	
42.	Wireless	1 set	
43.	Camera video	32 Unit	
44.	Dispenser	2 Unit	
45.	Pemadam	3 Unit	
46.	Alat Kantor Lainnya	45 Unit	
47.	UPS	4 Unit	
48.	Mesin Absensi	2 Unit	
49.	Whiteboard	5 Unit	
50.	Sice	1 Unit	

Sumber Data : Data BMD BPKAD Kab. Blitar, 2023

1.3 Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi OPD maka terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diperhatikan dan dimitigasi resikonya dalam perencanaan kinerjanya. Hal tersebut sebagai bentuk penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi perangkat daerah. Dengan harapan fungsi pelayanan publik perangkat daerah dapat berjalan optimal dan mendukung percepatan capaian kinerja organisasi. Maka penyusunan Perubahan Rencana Strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis internal maupun eksternal. Isu-isu strategis BPKAD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Terhadap Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi, melalui Optimalisasi Implementasi Penyederhanaan Birokrasi, Penguatan Budaya Kerja Organisasi, Penguatan Kinerja Organisasi, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembangunan Zona Integritas;
2. Tantangan Penyediaan Layanan Publik Yang Lebih Cepat, Baik dan Murah Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, berbasis Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Tantangan penguatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dari potensi-potensi baru, dan penekanan beban alokasi belanja pegawai daerah yang sesuai dengan ketentuan;
4. Tantangan penganggaran yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung program-program prioritas pembangunan daerah;
5. Tantangan peningkatan pelayanan perbendaharaan dan kas daerah yang efektif dalam rangka mendukung realisasi penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan;
6. Tantangan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, melalui peningkatan kapasitas Pejabat Penatausahaan BMD pada PD dan percepatan penyelesaian masalah aset daerah;
7. Tantangan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih efektif, melalui peningkatan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada PD;
8. Pengalokasian/ penambahan SDM yang sesuai dengan Standar Kebutuhan Pegawai/ Analisa Beban Kerja pada BPKAD Kabupaten Blitar; dan
9. Optimalisasi pengelolaan data dan arsip pengelolaan keuangan dan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar.

Di lingkup eksternal, berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka dapat ditelaah permasalahan dan isu-isu strategis sebagai berikut:

Tabel 1.3.1
Permasalahan dan Isu Strategis
BPKAD Kabupaten Blitar

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
M.3	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas	Implementasi SAKIP, RB, Inovasi dan pembangunan ZI yang belum optimal	Kebijakan (p*oliticalwill)* Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Panca Bhakti;	Belum optimalnya pemahaman SDM Aparatur terkait implementasi SAKIP RB dan ZI
T.1	Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas	2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang belum dapat diimplementasikan secara optimal	Akses komunikasi (koordinasi dan konsultasi) yang mudah dengan PD pengampu dan terdapat juknis pelaksanaan SIPD	Belum optimalnya pemahaman SDM Aparatur terkait implementasi SIPD
S.2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemda	Penyusunan LKPD dan Laporan BMD yang kurang optimal	Dilaksanakannya Rekonsiliasi Keuangan PD	Belum optimalnya peran PPK PD dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
			Dilaksanakannya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah PD	Belum optimalnya Penyelesaian permasalahan pengelolaan aset daerah dan peran Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, Pejabat Panatausahaan BMD pada PD dalam pengelolaan BMD;

Di lingkup Provinsi Jawa Timur, maka dapat ditelaah permasalahan dan isu-isu strategis sebagai berikut:

Tabel 1.3.2
Permasalahan dan Isu Strategis
BPKAD Provinsi Jawa Timur

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran BPKAD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Implementasi SAKIP, RB, Inovasi dan pembangunan ZI yang belum optimal	Kebijakan (p*oliticalwill)* Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dan Panca Bhakti;	Belum optimalnya pemahaman SDM Aparatur terkait implementasi SAKIP RB dan ZI
2.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang belum dapat diimplementasikan secara optimal	Akses komunikasi (koordinasi dan konsultasi) yang mudah dengan PD pengampu dan terdapat petunjuk teknis pelaksanaan SIPD	Belum optimalnya pemahaman SDM Aparatur terkait implementasi SIPD
3.	Mewujudkan pengelolaan keuda yang handal dan terintegrasi berbasis TI serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kab/kota yang akuntabel dan taat asas.	Penyelenggaraan SIPD yang belum optimal, karena kendala teknis dari pusat	Akses komunikasi (koordinasi dan konsultasi) yang mudah dengan perangkat daerah pengampu dan terdapat petunjuk teknis pelaksanaan SIPD	Belum optimalnya pemahaman SDM Aparatur terkait implementasi SIPD
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penyelenggaraan SIPD yang belum optimal dan belum terintegrasinya aplikasi keuangan daerah dan aplikasi BMD	Dilaksanakannya Rekonsiliasi Keuangan dan Barang Milik Daerah PD	Belum optimalnya peran PPK PD dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan belum optimalnya peran

				Pejabat Penatausahaan Keuangan PD;

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka BPKAD Kabupaten Blitar dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Blitar.

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang, maka berikut ini rumusan isu strategis pembangunan Blitar 2021-2026 :

1. Pengelolaan keuangan daerah (penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan) akan menyesuaikan SIPD yang dapat diintegrasikan dengan Aplikasi Pengelolaan BMD, dimana sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, RKA, RKA-P, DPA, DPPA, Penyusunan APBD, Perubahan APBD, pencairan, dan pelaporan;
2. Tuntutan Terhadap Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi, melalui Optimalisasi Implementasi Penyederhanaan Birokrasi, Penguatan Budaya Kerja Organisasi, Penguatan Kinerja Organisasi, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembangunan Zona Integritas;
3. Tantangan Penyediaan Layanan Publik Yang Lebih Cepat, Baik dan Murah Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, berbasis Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Tantangan penguatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dari potensi-potensi baru, dan penekanan beban alokasi belanja pegawai daerah yang sesuai dengan ketentuan;
5. Tantangan penganggaran yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung program-program prioritas pembangunan daerah;
6. Tantangan peningkatan pelayanan perbendaharaan dan kas daerah yang efektif dalam rangka mendukung realisasi penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan;

7. Tantangan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, melalui peningkatan kapasitas Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, Pejabat Panatausahaan BMD dan percepatan penyelesaian masalah aset daerah;
8. Tantangan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih efektif, melalui peningkatan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada PD
9. Pengalokasian/ penambahan SDM yang sesuai dengan Standar Kebutuhan Pegawai/ Analisa Beban Kerja pada BPKAD Kabupaten Blitar
10. Optimalisasi pengelolaan data dan arsip pengelolaan keuangan dan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023 merupakan komitmen antara pemberi amanah (pimpinan instansi yang lebih tinggi) kepada penerima amanah (pimpinan instansi) atas kesepakatan penetapan kinerja yang terukur dan terarah. Penetapan kinerja tersebut menjadi bagian dari perencanaan kinerja, yang menjadi pedoman bagi penerima amanah, untuk mencapai sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan, berdasarkan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran, indikator, dan target di dalam dokumen Perjanjian Kinerja diambil dari Rencana Kerja Tahunan (Renja Perangkat Daerah) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Di dalam dokumen Renstra dijelaskan bahwa BPKAD Kabupaten Blitar mendukung Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang ke-3: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Daerah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas. Hal tersebut didukung dengan penetapan sasaran strategis BPKAD Kabupaten Blitar, yaitu (1) meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Nilai SAKIP); (2) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah/ IPKD); (3) meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023, disusun berdasarkan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Secara kinerja kelembagaan, di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pajabat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah) bertanggung jawab terhadap Sasaran Strategis. Selanjutnya Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) bertanggung jawab terhadap Program, dan Pejabat Eselon IV bertanggung jawab terhadap Kegiatan. Pelaksana bertanggung jawab atas uraian tugasnya, yaitu membantu atasan langsung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan mengacu pada sub kegiatan.

Adapun sasaran strategis Perangkat Daerah diformalkan dalam Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Perjanjian Kinerja
BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	79/ BB
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	70
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	86%

Adapun sasaran strategis tersebut didukung oleh anggaran pada masing-masing program sebagai berikut:

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	12.466.726.101,00	APBD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	401.603.487.261,00	APBD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.620.882.400,00	APBD
JUMLAH	**415.691.095.762,00**	

Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023 secara garis besar merupakan upaya untuk menjawab permasalahan daerah di bidang peningkatan kinerja perangkat daerah menuju optimalisasi pelayanan masyarakat, dan secara khusus peningkatan pengelolaan keuangan daerah menuju kemandirian fiskal daerah. Dukungan atas keberhasilan upaya tersebut juga didukung oleh meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Maka BPKAD Kabupaten Blitar merespons melalui penetapan sasaran strategis sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1	**:**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
INDIKATOR	:	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah
TARGET	:	79/ BB

Sasaran Strategis 1 merupakan upaya untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Blitar sebagai pengampu urusan pemerintahan penunjang di bidang keuangan. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur melalui komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sasaran Strategis 1 mangacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2022 tentang Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar.

Tambahan Penjelasan Hasil Evaluasi SAKIP:

Analisis kegiatan dan anggaran dalam mencapai keberhasilan IKU (Indikator Kinerja Utama) BPKAD Kabupaten Blitar, dengan penjelasan sebagai berikut:

Secara spesifik, Sasaran Strategis 1 BPKAD Kabupaten Blitar didukung oleh 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan. Dimana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang berkaitan langsung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, & Ev. Kinerja Perangkat Daerah, dan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Di dalam Sub Kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang meliputi:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan berupa Renstra, Reviu Renstra, Renja, Renja Perubahan, Roadmap RB, Renja RB, penyusunan IKU, Pohon Kinerja, Penjenjangan Kinerja, reviu dan Penyusunan SOP;

2. Penyusunan Renaksi dan Pengukuran Kinerja secara berjenjang (sasaran strategis s.d. sasaran sub kegiatan yang diampu oleh Kepala PD s.d. Pelaksana);
3. Evaluasi Penilaian IPKD Kemendagri;
4. Fasilitasi Tim SAKIP PD dalam implementasi SAKIP, RB, SPIP;
5. Penyusunan dokumen Evaluasi kinerja (LKjIP PD), LKPJ, LPPD.

Akivitas tersebut mendukung keberhasilan capaian IKU PD. Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya lebih bersifat fasilitasi terhadap keberhasilan capaian IKU PD, yang dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	***Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah***	**79/ BB**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	***Rata-rata Tk. Cap. Kinerja Seluruh Keg. Pada Program Penunjang Urusan Pemda***	**100%**	**12.466.726.101,00**
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, & Ev. Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan***	**100%**	**111.345.400,00**
			Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dok Perencanaan PD*	2	111.345.400,00
			Kegiatan Administrasi Keuangan PD	***Persentase Lap. Admin. Keu PD yang Tepat Waktu dan Akuntabel***	**100**	**5.480.112.450,00**
			Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	45	5.269.132.950,00
			Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan	*Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/*	12	201.720.000,00

			dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	*Verifikasi Keuangan SKPD*		
			Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Lap Keu Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keu Akhir Tahun SKPD*	12	9.259.500,00
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	***Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Admin Kepegawaian PD***	**100**	**322.441.200,00**
			Sub. Keg. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Per UU*	55	322.441.200,00
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Waktu Pelaksanaan Adm Umum yg Akuntabel***	**12**	**859.770.649,00**
			Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	22.757.500,00
			Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	204.730.349,00
			Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	63.005.000,00
			Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang	2	162.777.800,00

				Disediakan		
			Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap.Peny. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	312.000.000,00
			Sub. Keg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	94.500.000,00
			Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	***Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda yang Tepat Sasaran***	**100**	**3.261.923.072,00**
			Sub. Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan yang Disediakan*	20	2.535.000.000,00
			Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	77	523.919.500,00
			Sub. Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	2	203.003.572,00
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemda yg Disediakan Tepat Waktu***	**100**	**1.265.041.997,00**
			Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12	564.200,00
			Sub. Keg.	*Jumlah Laporan*	12	434.330.971,00

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		
			Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	5	830.146.826,00
			Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase BMD Penunjang Urusan Pemda dalam Kondisi Baik***	**100**	**1.166.091.333,00**
			Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	20	107.118.586,00
			Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	79	159.044.000,00
			Sub. Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi*	8	899.928.747,00

SASARAN STRATEGIS 2	**:**	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
INDIKATOR	:	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
TARGET	:	70

Sasaran Strategis 2 mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel pada periode tertentu, meliputi perencanaan, penganggaran, transparansi, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

1. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
   a. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD
   b. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA PPAS
   c. Kesesuaian Nomenklatur Program KUA PPAS dan APBD
   d. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA PPAS
   e. Kesesuaian Pagu Program KUA PPAS dan APBD
2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD;
   a. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Fungsi Pendidikan sebesar 20%
   b. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Urusan Kesehatan sebesar 10%
   c. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Infrastruktur sebesar 25%
   d. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
   a. Ketepatan Waktu

      Merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan daerah oleh pemerintah daerah melalui Sistem informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Keteraksesan

      Merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat

diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk public melalui system informasi pemerintahan daerah, sekurang-kurangnya 2 tahun anggaran.

4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD;
   a. Penyerapan Anggaran Belanja Operasional
   b. Penyerapan Anggaran Belanja Modal
   c. Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga
   d. Penyerapan Anggaran Belanja Transfer
5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah;
   a. Kemandirian Keuangan
   b. Fleksibilitas Keuangan
   c. Solvabilitas Keuangan
   d. Solvabilitas Jangka Pendek
   e. Solvabilitas Jangka Panjang
   f. Solvabilitas Layanan
6. Opini BPK

   Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan pengukuran berdasarkan Opini BPK atas LKPD yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir berturut-turut.

Penentuan bobot dimensi IPKD adalah sebagai berikut:

DIMENSI	BOBOT
Indeks Dimensi Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD	15
Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	15
Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD	20
Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	15
Opini BPK.	15
TOTAL	**100**

Tambahan Penjelasan Hasil Evaluasi SAKIP:

Analisis kegiatan dan anggaran dalam mencapai keberhasilan IKU (Indikator Kinerja Utama) BPKAD Kabupaten Blitar, dengan penjelasan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah mendukung Sasaran Strategis ke 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Mendukung Dimensi 1, Dimensi 2, Dimensi 3, Dimensi 6 IPKD. Penekanan pada kegiatan ini lebih pada proses perencanaan penganggaran yang dokumennya harus diupload ke dalam etransparansi Kabupaten Blitar agar dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Mendukung Dimensi 3, Dimensi 4, dan Dimensi 6. Kegiatan ini lebih spesifik pada dukungan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Operasional, Penyerapan Anggaran Belanja Modal, Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga, dan Penyerapan Anggaran Belanja Transfer.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuda Mendukung Dimensi 3, Dimensi 5, dan Dimensi 6. Kegiatan ini lebih mendukung pada aspek Kondisi keuangan Daerah yang meliputi: Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Keuangan, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, dan Solvabilitas Layanan. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung kesiapan dokumen keuangan daerah yang harus diupload pada etransparansi. Dan penekanan utama kegiatan ini adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi syarat utama dalam dimensi 6 yaitu Opini WTP dari BPK atas pemeriksaan keuangan daerah.
4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuda Dimensi 3, Dimensi 4, dan Dimensi 6, mendukung kecukupan dari penyerapan anggaran belanja transfer dan belanja tidak terduga, selain kecukupan upload dokumen dan opini BPK.

Selanjutnya keterkaitan antara IKU dan program/ kegiatan/ sub kegiatan didukung oleh penganggaran sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2 didukung oleh Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN	ANGGARAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD**	**100%**		**401.603.487.261,00**
	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	**92%**		
	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	**84%**		
	Persentase SKPD yang Laporan Keuangan	**100%**		

	Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP			
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**Mendukung Dimensi 1, Dimensi 2, Dimensi 3, Dimensi 6**	**1.721.495.100,00**
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	2		103.566.500,00
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2		103.916.500,00
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52		62.039.000,00
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52		10.350.000,00
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	52		14.922.000,00
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52		22.878.000,00
Sub.Keg. Koord dan Peny Perda ttg APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2		1.019.942.100,00
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perub APBD dan Perkada ttg Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2		330.390.900,00
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dok Regulasi serta Kebijakan Bid. Anggaran	1		3.960.000,00

Sub. Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	36		1.200.100,00
Sub. Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	52		1.690.000,00
Sub. Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2		1.540.000,00
Sub. Keg. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	52		45.100.000,00
Keg Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase Tk Penyerapan Anggaran PD sesuai Rencana**	**95%**	**Mendukung Dimensi 3, Dimensi 4, dan Dimensi 6**	**343.933.300,00**
Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15.200		206.527.000,00
Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12		20.904.800,00
Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi Sinkronisasi Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12		33.637.000,00
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dan Laporan Arus Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran	Jumlah Lap Realisasi Penerimaan & Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Lap Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Lap Realisasi	12		38.511.500,00

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
Sub.Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dok Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	120		2.140.000,00
Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu yg Berkait an dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	1		2.530.000,00
Sub.Keg. Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pemerintah Kab/ Kota	52		39.683.000,00
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuda	**Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Lapkeu**	**100%**	**Mendukung Dimensi 3, Dimensi 5, dan Dimensi 6**	**420.168.700,00**
Sub.Keg. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kasda	78		29.145.000
Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dok Hasil Rekon dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	208		16.581.000
Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	78		63.036.300

Sub.Keg. Koordinasi dan Penysusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota	Jumlah Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2		117.803.600
Sub.Keg. Peny Tanggapan/ TL thd LHP BPK atas Lap Pertanggungjawaban Pelak APBD	Jumlah Dok Tanggapan/ TL Terhadap LHP BPK atas Lap. Pertanggung jawaban Pelak APBD	1		7.855.000
Sub.Keg. Koord Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jml Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah	1		53.819.400
Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan PTO Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Kebj dan Panduan Teknis Ops. Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	2		106.435.000
Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/ Kota	Jumlah Orang yg Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelap. dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/ Kota	78		310.104.200
Sub.Keg. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/ Kota	Jumlah BLUD Kab/ Kota yang dibina	26		24.891.900,00
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuda	**Persentase Realisasi Dana BK, Bagi Hasil, dan Dana Darurat**	**100%**	**Dimensi 3, Dimensi 4, dan Dimensi 6**	**399.117.890.161, 00**
Sub.Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran BK	Jml Lap Hasil Analisis Perencanaan & Penyaluran BK	1		378.809.764.000, 00
Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan DD dan Mendesak	1		2.273.000.000,00

Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	1		18.035.126.161,00

Tujuan pengukuran IPKD adalah (1) mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada periode tertentu; (2) memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; (3) melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD pemerintah daerah; (4) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah; dan (5) meningkatkan pengawasan internal atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

SASARAN STRATEGIS 3	**:**	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah**
INDIKATOR	:	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah
TARGET	:	86

Sasaran Strategis 3 mengukur kualitas pengelolaan aset/ BMD, sebagai satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan daerah, dimana di dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Nilai BMD masuk ke dalam pencatatan Aset Tetap. Tingkat kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset dapat tercapai jika proses pengelolaan BMD (perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan) dapat berjalan sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD;
3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD

Sasaran Strategis 3 didukung oleh Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar**	**90%**	**1.620.882.400,00**
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase PD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai Peraturan UU**	**90%**	**1.620.882.400,00**
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	104.577.800,00
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	116.607.000,00

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	52	2.751.000,00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	20.768.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Penatausahaan BMD	1	147.644.700,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Hasil Pengamanan BMD	1	1.030.233.900,00
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD	2	150.000.000,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jml Dok Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD	6	25.500.000,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	52	22.500.000,00
Sub. Keg. Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD	5	300.000,00

Tambahan Penjelasan Hasil Evaluasi SAKIP:

Analisis kegiatan dan anggaran dalam mencapai keberhasilan IKU (Indikator Kinerja Utama) BPKAD Kabupaten Blitar, dengan penjelasan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Kegiatan Pengelolaan BMD mendukung peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah. Kualitas pengelolaan daerah dapat optimal ketika proses perencanaan BMD melalui penyusunan standar harga, standar BMD, RKBMD, RKPBMD, Penatausahaan, pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Proses Rekonsiliasi secara berkala, hingga proses penghapusan BMD dan pelaporan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Upaya-upaya tersebut pada akhirnya akan mendukung penyajian nilai aset pada neraca barang secara akuntabel dan memiliki tingkat kesesuaian dengan neraca aset tetap pada laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat keandalan data aset daerah

dapat terpenuhi ketika semua proses pengelolaan BMD dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan meningkatnya pengelolaan aset daerah, maka dapat mendukung pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset daerah secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023 mendiskripsikan pengukuran capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dimana Eselon II mengampu sasaran strategis, eselon III mengampu sasaran program, eselon IV mengampu sasaran kegiatan, dan pelaksana membantu melaksanakan tugas atasan langsungnya/ sub kegiatan, melalui penjabaran uraian kerja sub kegiatan.

Tabel 3.1.1
Realisasi dan Capaian Kinerja
BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	79,00/ BB	81,40/A	103,03%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	70	71	101,43%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	86%	97,80%	113,72%

Definisi Operasional Indikator Kinerja:

1. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah. Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja di Perangkat daerah diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Eselon II, Eselon IIIa, Eselon IIIb, Eselon Iva, Jabatan Fungsional Ahli Muda, sampai dengan Pelaksana. Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana

strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Metode penghitungan telah dijelaskan di dalam Bab II Perencanaan Kinerja Dokumen LKjIP BPKAD kabupaten Blitar tahun 2023.

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020. Metode penghitungan telah dijelaskan di dalam Bab II Perencanaan Kinerja Dokumen LKjIP BPKAD kabupaten Blitar tahun 2023.
3. Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah, merupakan Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Blitar untuk mengukur kualitas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis SMART-C. Indikator ini diformulasikan sebagai alat pengukuran kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar sejak tahun 2021. Implementasi Indikator ini merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya capaian kinerja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023 dijabarkan dalam perhitungan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1	**:**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
INDIKATOR	:	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah
TARGET	:	79,00/BB
REALISASI	:	81,40/A
CAPAIAN	:	103,03%

Dalam rangka meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan dukungan peningkatan kinerja pada masing-masing bidang, melalui tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi

mandiri terkait implementasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun perbandingan nilai SAKIP tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (2022) sebagai berikut:

KOMPONEN SAKIP	BOBOT	NILAI 2022	NILAI 2023*)
Perencanaan Kinerja	30,00	27,32	24,00
Pengukuran Kinerja	30,00	20,00	24,60
Pelaporan Kinerja	15,00	13,93	12,30
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,38	20,50
TOTAL NILAI	**100,00**	**80,63**	**81,40**

Keterangan: *) Hasil Penilaian Mandiri Perangkat Daerah

Analisa:

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka penilaian mandiri pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari 80,63 menjadi 81,40. Di dalam aspek perencanaan kinerja, BPKAD Kabupaten Blitar mencapai nilai 24,00 karena telah memenuhi Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kinerja, dan telah memenuhi standar yang baik, dan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan kinerja pada tahun selanjutnya. Terkait dengan indikatornya juga tidak mengalami perubahan, dalam arti telah memenuhi konsistensi pengukuran tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, sehingga dapat dibandingkan.

Terkait dengan pengukuran kinerja, Nilai BPKAD Kabupaten Blitar pada Tahun 2023 meningkat menjadi 24,60 bila dibandngkan dengan tahun 2022 sebesar 20,00. Hal tersebut dapat tercapai ketika BPKAD berupaya untuk memenuhi kaidah-kaidah pengukuran berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD, dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD, serta Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2022 tentang Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, pada tahun BPKAD Kab. Blitar mendapatkan poin 12,30 dan 20,50. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Berdasarkan informasi tersebut maka strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja pada tahun mendatang antara lain:

1. Penguatan fungsi perencanaan kinerja, melalui optimalisasi Tim SAKIP PD dalam mengimplementasikan SAKIP di setiap jenjang;
2. Optimalisasi pengukuran kinerja dengan menyesuaikan SOP Pengukuran Kinerja;
3. Melaksanakan penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melalui rembug kinerja
4. Penguatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui pendalaman tugas dan intensifikasi rapat evaluasi internal tim evaluator SAKIP PD.

Faktor Keberhasilan dalam Implementasi SAKIP BPKAD Kabupaten Blitar antara lain: (1) komitmen kuat dari pimpinan beserta staf bahwa implementasi SAKIP mendukung kinerja PD di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; (2) Budaya organisasi untuk belajar bersama terkait perkembangan peraturan terkini membangun etos kerja yang lebih baik melalui rembug kinerja/ rapat evaluasi internal; (3) Adanya bimbingan teknis yang dapat mengupgrade pengetahuan dan wawasan karyawan-karyawati BPKAD dalam memahami akuntabilitas kinerja kelembagaan. Faktor Penghambatnya antara lain ritme kerja pada masing-masing bidang yang relatif "padat" terkadang menyulitkan tim SAKIP dalam menyusun jadwal evaluasi kinerja.

Selanjutnya Penilaian tersebut didasarkan pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023, sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
	TOTAL NILAI SAKIP			**81,40**		
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30,00**		**24,00**		
1.a	**Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia**	**6,00**	**A**	**4,80**		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.					
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.					
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.					
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.					

5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.					
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.					
1.b	**Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)**	**9,00**	**BB**	**7,20**		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.					
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.					
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.					
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.					
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.					
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).					
7	Target yg ditetapkan dlm Perenc Kinerja dpt dicapai (achievable), menantang, & realistis.					
No	**Komponen/Sub Komponen/Kriteria**	**Bobot**	**Unit/Satker**		**Catatan**	**Daftar Evidence**
			Jawaban	**Nilai**		
	- Dapat Dicapai (*achievable*)					
	- Perencanaan Kinerja Menantang					
	- Perencanaan Kinerja Realistis					
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).					
	- Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*)					
	- Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang selaras yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*)					

9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).					
	- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*)					
	- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang strategi tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*)					
	- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang kebijakan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*)					
	- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*)					
10	Setiap unit usaha merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.					
	- Setiap unit/satuan kerja merumuskan Perencanaan Kinerja					
	- Setiap unit/satuan kerja menetapkan Perencanaan Kinerja					
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.					
	- Setiap pegawai merumuskan Perencanaan Kinerja					
	- Setiap pegawai kerja menetapkan Perencanaan Kinerja					
1.c	**Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**	**15,00**	**BB**	**12,00**		
Kriteria:						
No	**Komponen/Sub Komponen/Kriteria**	**Bobot**	**Unit/Satker**		**Catatan**	**Daftar Evidence**
			Jawaban	**Nilai**		
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.					
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.					
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.					
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.					
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.					

6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.					
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.					
	- Setiap unit/satuan kerja memahami dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan					
	- Setiap unit/satuan kerja peduli dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan					
	- Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan					
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.					
	- Setiap pegawai memahami dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan					
	- Setiap pegawai peduli dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan					
	- Setiap pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan					
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**		**24,60**		
2.a	**Pengukuran Kinerja telah dilakukan**	**6,00**	**A**	**5,40**		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.					
	- Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja					
	- Terdapat pedoman teknis pengumpulan data kinerja					
No	**Komponen/Sub Komponen/Kriteria**	**Bobot**	**Unit/Satker**		**Catatan**	**Daftar Evidence**
			Jawaban	**Nilai**		
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.					
	- Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja					
	- Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas cara mengukur indikator kinerja.					
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.					

2.b	**Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**	**9,00**	**BB**	**7,20**		
1	Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja.					
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.					
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.					
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.					
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.					
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
2.c	**Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**	**15,00**	**BB**	**12,00**		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.					
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.					
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.					
No	**Komponen/Sub Komponen/Kriteria**	**Bobot**	**Unit/Satker**		**Catatan**	**Daftar Evidence**
			Jawaban	**Nilai**		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.					
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.					
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.					

7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.					
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.					
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.					
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**		**12,30**		
3.a	**Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja**	**3,00**	**A**	**2,70**		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.					
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.					
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.					
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.					
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.					
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.					
3.b	**Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya**	**4,50**	**BB**	**3,60**		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.					
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.					
No	**Komponen/Sub Komponen/Kriteria**	**Bobot**	**Unit/Satker**		**Catatan**	**Daftar Evidence**
			Jawaban	**Nilai**		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.					
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan target jangka menengah					

	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah					
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya					
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)					
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya nyata dan/atau hambatannya					
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.					
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).					
3.c	**Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**	**7,50**	**BB**	**6,00**		
No	**Komponen/Sub Komponen/Kriteria**	**Bobot**	**Unit/Satker**		**Catatan**	**Daftar Evidence**
			Jawaban	**Nilai**		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).					
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.					
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.					

4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.					
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.					
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.					
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.					
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**		**20,50**		
4.a	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**	**5,00**	**A**	**4,50**		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.					
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.					
4.b	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**	**7,50**	**BB**	**6,00**		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.					
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.					
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.					
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					
No	**Komponen/Sub Komponen/Kriteria**	**Bobot**	**Unit/Satker**		**Catatan**	**Daftar Evidence**
			Jawaban	**Nilai**		
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).					

4.c	**Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**	**12,50**	**BB**	**10,00**		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.					
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.					
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.					
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.					
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.					

Selanjutnya, dengan nilai SAKIP tersebut, maka dapat dikategorikan predikat sebagai berikut:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	**Sangat Memuaskan,** telah terwujud *Good Governance* seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80 - 90	**Memuaskan**, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/ Pengawas/ Sub Koordinator
3	BB	>70 - 80	**Sangat Baik**, terdapat gambaran bahwa AKIP sangar baik pada 2/3 unit kerja, baik itu kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerjayang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon III/ Koordinator
4	B	>60 - 70	**Baik**, terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sapai dengan level eselon II/ unit kerja.

5	C	>50 - 60	**Cukup (Memadai)**, terdapat gambaran bahwa AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikanmendasar di level pusat.
6	CC	>30 - 50	**Kurang**, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar dilevel pusat.
7	D	0 - 30	**Sangat Kurang**, Sistem dan Tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Berdasarkan nilai dan tabulasi tersebut, maka nilai SAKIP BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023 sebesar 80,63 dengan Predikat A (Memuaskan), sehingga capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 sebesar 109,55 %, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Capaian Kinerja IKU 1 = (Realisasi / Target) x 100%
= (81,40 / 79) x 100%
= **103,03 %**

Capaian tersebut didukung oleh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Rata-rata Tk. Cap. Kinerja Seluruh Keg. pada Program Penunjang Urusan Pemda**	**76%**	**100%**	**131,58%**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, & Ev. Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan**	**100**	**100**	**100%**
Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	2	2	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan PD	**Persentase Lap. Admin. Keu PD yang Tepat Waktu dan Akuntabel**	**100**	**100**	**100%**

Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	45	100%
Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%
Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keu Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keu Akhir Tahun SKPD	12	12	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	**Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Admin Kepegawaian PD**	**100**	**100**	**100%**
Sub. Keg. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Per UU	55	55	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Waktu Pelaksanaan Adm Umum yg Akuntabel**	**12**	**12**	**112%**
Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	100%
Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	100%
Sub. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	100%
Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100%
Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap.Peny. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	86	172%
Sub. Keg. Penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	100	100	100%

Dinamis pada SKPD	Dinamis pada SKPD			
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda yang Tepat Sasaran**	**100%**	**100%**	**100%**
Sub. Keg. Pengadaan Kend. Dinas Operasional atau Lap	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan yang Disediakan	20	20	100%
Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77	77	100%
Sub. Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemda yg Disediakan Tepat Waktu**	**100**	**100**	**100%**
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	100%
Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	**Persentase BMD Penunjang Urusan Pemda dalam Kondisi Baik**	**100%**	**100%**	**100%**
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kend. Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	20	100%

Lapangan				
Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79	79	100%
Sub. Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	8	8	100%

SASARAN STRATEGIS 2	**:**	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
INDIKATOR	:	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
TARGET	:	70
REALISASI	:	71
CAPAIAN	:	101,43

Perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang IPKD, sebagai berikut:

1. **Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**
   a. **Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD**

NO.	RPJMD	RKPD	SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
	URUSAN/ PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM		
1	2	3	4	5
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
	Pendidikan	**Pendidikan**		
1	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
2	*Program Pengelolaan Pendidikan*	*Program Pengelolaan Pendidikan*	Sesuai	1
3	*Program Pengembangan Kurikulum*	*Program Pengembangan Kurikulum*	Sesuai	1
4	*Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*	*Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*	Sesuai	1
5	*Program Pengendalian Perizinan Pendidikan*	*Program Pengendalian Perizinan Pendidikan*	Sesuai	1

	Kesehatan	**Kesehatan**		
6	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
7	*Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	*Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	Sesuai	1
8	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*	Sesuai	1
9	*Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman*	*Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman*	Sesuai	1
10	*Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*	*Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*	Sesuai	1
	RSD Ngudi Waluyo			
11	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
12	*Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	*Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	Sesuai	1
	RSD Srengat			
13	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
14	*Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	*Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	Sesuai	1
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
15	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
16	*Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*	*Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*	Sesuai	1
17	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*	Sesuai	1
18	*Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional*	*Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional*	Sesuai	1
19	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah*	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah*	Sesuai	1
20	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase*	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase*	Sesuai	1
21	*Program Penataan*	*Program Penataan Bangunan*	Sesuai	1

	Bangunan Gedung	*Gedung*		
22	*Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya*	*Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya*	Sesuai	1
23	*Program Penyelenggaraan Jalan*	*Program Penyelenggaraan Jalan*	Sesuai	1
24	*Program Pengembangan Jasa Konstruksi*	*Program Pengembangan Jasa Konstruksi*	Sesuai	1
25	*Program Penyelenggaraan Penataan Ruang*	*Program Penyelenggaraan Penataan Ruang*	Sesuai	1
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**		
26	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
27	*Program Pengembangan Perumahan*	*Program Pengembangan Perumahan*	Sesuai	1
28	*Program Kawasan Permukiman*	*Program Kawasan Permukiman*	Sesuai	1
29	*Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)*	*Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)*	Sesuai	1
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**		
26	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
27	*Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*	*Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*	Sesuai	1
28	*Program Penanggulangan Bencana*	*Program Penanggulangan Bencana*	Sesuai	1
29	*Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran*	*Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran*	Sesuai	1
	Sosial	**Sosial**		
30	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
31	*Program Pemberdayaan Sosial*	*Program Pemberdayaan Sosial*	Sesuai	1
32	*Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan*	*Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan*	Sesuai	1
33	*Program Rehabilitasi Sosial*	*Program Rehabilitasi Sosial*	Sesuai	1
34	*Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial*	*Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial*	Sesuai	1
35	*Program Penanganan Bencana*	*Program Penanganan Bencana*	Sesuai	1

B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Tenaga Kerja	**Tenaga Kerja**		
36	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
37	*Program Perencanaan Tenaga Kerja*	*Program Perencanaan Tenaga Kerja*	Sesuai	1
38	*Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja*	*Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja*	Sesuai	1
39	*Program Penempatan Tenaga Kerja*	*Program Penempatan Tenaga Kerja*	Sesuai	1
40	*Program Hubungan Industrial*	*Program Hubungan Industrial*	Sesuai	1
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
41	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
42	*Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan*	*Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan*	Sesuai	1
43	*Program Perlindungan Perempuan*	*Program Perlindungan Perempuan*	Sesuai	1
44	*Program Peningkatan Kualitas Keluarga*	*Program Peningkatan Kualitas Keluarga*	Sesuai	1
45	*Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak*	*Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak*	Sesuai	1
46	*Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)*	*Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)*	Sesuai	1
47	*Program Perlindungan Khusus Anak*	*Program Perlindungan Khusus Anak*	Sesuai	1
	Pangan	**Pangan**		
48	*Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan*	*Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan*	Sesuai	1
49	*Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat*	*Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat*	Sesuai	1
50	*Program Penanganan Kerawanan Pangan*	*Program Penanganan Kerawanan Pangan*	Sesuai	1
51	*Program Pengawasan Keamanan Pangan*	*Program Pengawasan Keamanan Pangan*	Sesuai	1
	Pertanahan	**Pertanahan**		
52	*Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan*	*Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan*	Sesuai	1

53	*Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan*	*Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan*	Sesuai	1
	Lingkungan Hidup	**Lingkungan Hidup**		
54	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
55	*Program Perencanaan Lingkungan Hidup*	*Program Perencanaan Lingkungan Hidup*	Sesuai	1
56	*Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	*Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	Sesuai	1
57	*Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)*	*Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)*	Sesuai	1
58	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*	Sesuai	1
59	*Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	*Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	Sesuai	1
60	*Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	*Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	Sesuai	1
61	*Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup*	*Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup*	Sesuai	1
62	*Program Pengelolaan Persampahan*	*Program Pengelolaan Persampahan*	Sesuai	1
	Administrasi Kependudukan dan Capil	**Administrasi Kependudukan dan Capil**		
63	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
64	*Program Pendaftaran Penduduk*	*Program Pendaftaran Penduduk*	Sesuai	1
65	*Program Pencatatan Sipil*	*Program Pencatatan Sipil*	Sesuai	1
66	*Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Sesuai	1
67	*Program Pengelolaan Profil Kependudukan*	*Program Pengelolaan Profil Kependudukan*	Sesuai	1
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**		
68	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1

69	*Program Penataan Desa*	*Program Penataan Desa*	Sesuai	1
70	*Program Peningkatan Kerjasama Desa*	*Program Peningkatan Kerjasama Desa*	Sesuai	1
71	*Program Administrasi Pemerintahan Desa*	*Program Administrasi Pemerintahan Desa*	Sesuai	1
72	*Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat*	*Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat*	Sesuai	1
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
73	*Program Pengendalian Penduduk*	*Program Pengendalian Penduduk*	Sesuai	1
74	*Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*	*Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*	Sesuai	1
75	*Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)*	*Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)*	Sesuai	1
	Perhubungan	**Perhubungan**		
76	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
77	*Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*	*Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*	Sesuai	1
78	*Program Pengelolaan Pelayaran*	*Program Pengelolaan Pelayaran*	Sesuai	1
	Komunikasi dan Informatika	**Komunikasi dan Informatika**		
79	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
80	*Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik*	*Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik*	Sesuai	1
81	*Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*	*Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*	Sesuai	1
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		
82	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
83	*Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam*	*Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam*	Sesuai	1
84	*Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi*	*Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi*	Sesuai	1
85	*Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi*	*Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi*	Sesuai	1

86	*Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian*	*Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian*	Sesuai	1
87	*Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi*	*Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi*	Sesuai	1
88	*Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)*	*Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)*	Sesuai	1
89	*Program Pengembangan UMKM*	*Program Pengembangan UMKM*	Sesuai	1
	Penanaman Modal	**Penanaman Modal**		
90	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
91	*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*	*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*	Sesuai	1
92	*Program Promosi Penanaman Modal*	*Program Promosi Penanaman Modal*	Sesuai	1
93	*Program Pelayanan Penanaman Modal*	*Program Pelayanan Penanaman Modal*	Sesuai	1
94	*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	Sesuai	1
95	*Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	*Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	Sesuai	1
	Kepemudaan Olah Raga	**Kepemudaan Olah Raga**		
96	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan*	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan*	Sesuai	1
97	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan*	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan*	Sesuai	1
98	*Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*	*Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*	Sesuai	1
	Statistik	**Statistik**		
99	*Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*	*Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*	Sesuai	1
	Persandian	**Persandian**		
100	*Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi*	*Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi*	Sesuai	1
	Kebudayaan	**Kebudayaan**		
101	*Program Pengembangan*	*Program Pengembangan*	Sesuai	1

	Kebudayaan	*Kebudayaan*		
102	*Program Pengembangan Kesenian Tradisional*	*Program Pengembangan Kesenian Tradisional*	Sesuai	1
103	*Program Pembinaan Sejarah*	*Program Pembinaan Sejarah*	Sesuai	1
104	*Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya*	*Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya*	Sesuai	1
105	*Program Pengelolaan Permuseuman*	*Program Pengelolaan Permuseuman*	Sesuai	1
	Perpustakaan	**Perpustakaan**		
106	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
107	*Program Pembinaan Perpustakaan*	*Program Pembinaan Perpustakaan*	Sesuai	1
	Kearsipan	**Kearsipan**		
108	*Program Pengelolaan Arsip*	*Program Pengelolaan Arsip*	Sesuai	1
109	*Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip*	*Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip*	Sesuai	1
110	*Program Perizinan Penggunaan Arsip*	*Program Perizinan Penggunaan Arsip*	Sesuai	1
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
	Kelautan dan Perikanan	**Kelautan dan Perikanan**		
111	*Program Pengelolaan Perikanan Tangkap*	*Program Pengelolaan Perikanan Tangkap*	Sesuai	1
112	*Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*	*Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*	Sesuai	1
113	*Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*	*Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*	Sesuai	1
114	*Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan*	*Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan*	Sesuai	1
	Pariwisata	**Pariwisata**		
115	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
116	*Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata*	*Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata*	Sesuai	1
117	*Program Pemasaran Pariwisata*	*Program Pemasaran Pariwisata*	Sesuai	1
118	*Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*	*Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*	Sesuai	1
119	*Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*	*Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*	Sesuai	1

	Pertanian	**Pertanian**		
120	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Sesuai	1
121	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian*	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian*	Sesuai	1
122	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian*	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian*	Sesuai	1
123	*Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*	*Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*	Sesuai	1
124	*Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian*	*Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian*	Sesuai	1
125	*Program Perizinan Usaha Pertanian*	*Program Perizinan Usaha Pertanian*	Sesuai	1
126	*Program Penyuluhan Pertanian*	*Program Penyuluhan Pertanian*	Sesuai	1
	Perdagangan	**Perdagangan**		
127	*Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan*	*Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan*	Sesuai	1
128	*Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan*	*Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan*	Sesuai	1
129	*Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting*	*Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting*	Sesuai	1
130	*Program Pengembangan Ekspor*	*Program Pengembangan Ekspor*	Sesuai	1
131	*Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen*	*Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen*	Sesuai	1
132	*Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri*	*Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri*	Sesuai	1
	Perindustrian	**Perindustrian**		
133	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
134	*Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri*	*Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri*	Sesuai	1
135	*Program Pengendalian Izin Usaha Industri*	*Program Pengendalian Izin Usaha Industri*	Sesuai	1
136	*Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*	*Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*	Sesuai	1
	Transmigrasi	**Transmigrasi**		
137	*Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	*Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	Sesuai	1

D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
	Sekreatriat Daerah	**Sekreatriat Daerah**		
138	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
139	*Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat*	*Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat*	Sesuai	1
140	*Program Perekonomian Dan Pembangunan*	*Program Perekonomian Dan Pembangunan*	Sesuai	1
	Sekretariat DPRD	**Sekretariat DPRD**		
141	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
142	*Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD*	*Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD*	Sesuai	1
E	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
	Perencanaan	**Perencanaan**		
143	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
144	*Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah*	*Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah*	Sesuai	1
145	*Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*	Sesuai	1
	Keuangan	**Keuangan**		
146	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
147	*Program Pengelolaan Keuangan Daerah*	*Program Pengelolaan Keuangan Daerah*	Sesuai	1
148	*Program Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*Program Pengelolaan Barang Milik Daerah*	Sesuai	1
149	*Program Pengelolaan Pendapatan Daerah*	*Program Pengelolaan Pendapatan Daerah*	Sesuai	1
	Kepegawaian	**Kepegawaian**		
150	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
151	*Program Kepegawaian Daerah*	*Program Kepegawaian Daerah*	Sesuai	1
	Pendidikan dan Pelatihan	**Pendidikan dan Pelatihan**		

152	*Program Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*Program Pengembangan Sumber Daya Manusia*	Sesuai	1
	Penelitian dan Pengembangan	**Penelitian dan Pengembangan**		
153	*Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah*	*Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah*	Sesuai	1
F	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
	Inspektorat	**Inspektorat**		
154	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
155	*Program Penyelenggaraan Pengawasan*	*Program Penyelenggaraan Pengawasan*	Sesuai	1
156	*Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi*	*Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi*	Sesuai	1
G	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**		
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	**Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)**		
157	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
158	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*	Sesuai	1
159	*Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*	*Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*	Sesuai	1
160	*Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	*Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	Sesuai	1
161	*Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	*Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	Sesuai	1
162	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Sesuai	1
H	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	**Kesatuan Bangsa dan Politik**		
163	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
164	*Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan*	*Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan*	Sesuai	1
165	*Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta*	*Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta*	Sesuai	1

	Budaya Politik	*Budaya Politik*		
166	*Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	*Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	Sesuai	1
167	*Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*	*Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*	Sesuai	1
168	*Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial*	*Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial*	Sesuai	1
TOTAL SKOR/ NILAI				**168**

Jumlah Sesuai : 168

Jumlah Tidak Sesuai : 0

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program

= 168 / 168

= 1

b. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA PPAS

NO.	RKPD	KUA PPAS	SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
	URUSAN/ PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM		
1	2	3	4	5
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
	Pendidikan	**Pendidikan**		
1	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
2	*Program Pengelolaan Pendidikan*	*Program Pengelolaan Pendidikan*	Sesuai	1
3	*Program Pengembangan Kurikulum*	*Program Pengembangan Kurikulum*	Sesuai	1
4	*Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*	*Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*	Sesuai	1
5	*Program Pengendalian Perizinan Pendidikan*	*Program Pengendalian Perizinan Pendidikan*	Sesuai	1

	Kesehatan	**Kesehatan**		
6	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
7	*Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	*Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	Sesuai	1
8	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*	Sesuai	1
9	*Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman*	*Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman*	Sesuai	1
10	*Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*	*Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*	Sesuai	1
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
11	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
12	*Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*	*Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*	Sesuai	1
13	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*	Sesuai	1
14	*Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional*	*Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional*	Sesuai	1
15	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah*	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah*	Sesuai	1
16	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase*	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase*	Sesuai	1
17	*Program Penataan Bangunan Gedung*	*Program Penataan Bangunan Gedung*	Sesuai	1
18	*Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya*	*Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya*	Sesuai	1
19	*Program Penyelenggaraan Jalan*	*Program Penyelenggaraan Jalan*	Sesuai	1
20	*Program Pengembangan Jasa Konstruksi*	*Program Pengembangan Jasa Konstruksi*	Sesuai	1
21	*Program Penyelenggaraan Penataan Ruang*	*Program Penyelenggaraan Penataan Ruang*	Sesuai	1
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**		
22	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
23	*Program Pengembangan Perumahan*	*Program Pengembangan Perumahan*	Sesuai	1

24	*Program Kawasan Permukiman*	*Program Kawasan Permukiman*	Sesuai	1
25	*Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)*	*Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)*	Sesuai	1
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**		
26	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
27	*Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*	*Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*	Sesuai	1
28	*Program Penanggulangan Bencana*	*Program Penanggulangan Bencana*	Sesuai	1
29	*Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran*	*Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran*	Sesuai	1
	Sosial	**Sosial**		
30	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
31	*Program Pemberdayaan Sosial*	*Program Pemberdayaan Sosial*	Sesuai	1
32	*Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan*	*Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan*	Sesuai	1
33	*Program Rehabilitasi Sosial*	*Program Rehabilitasi Sosial*	Sesuai	1
34	*Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial*	*Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial*	Sesuai	1
35	*Program Penanganan Bencana*	*Program Penanganan Bencana*	Sesuai	1
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
	Tenaga Kerja	**Tenaga Kerja**		
36	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
37	*Program Perencanaan Tenaga Kerja*	*Program Perencanaan Tenaga Kerja*	Sesuai	1
38	*Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja*	*Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja*	Sesuai	1
39	*Program Penempatan Tenaga Kerja*	*Program Penempatan Tenaga Kerja*	Sesuai	1
40	*Program Hubungan Industrial*	*Program Hubungan Industrial*	Sesuai	1

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
41	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
42	*Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan*	*Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan*	Sesuai	1
43	*Program Perlindungan Perempuan*	*Program Perlindungan Perempuan*	Sesuai	1
44	*Program Peningkatan Kualitas Keluarga*	*Program Peningkatan Kualitas Keluarga*	Sesuai	1
45	*Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak*	*Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak*	Sesuai	1
46	*Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)*	*Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)*	Sesuai	1
47	*Program Perlindungan Khusus Anak*	*Program Perlindungan Khusus Anak*	Sesuai	1
	Pangan	**Pangan**		
48	*Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan*	*Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan*	Sesuai	1
49	*Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat*	*Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat*	Sesuai	1
50	*Program Penanganan Kerawanan Pangan*	*Program Penanganan Kerawanan Pangan*	Sesuai	1
51	*Program Pengawasan Keamanan Pangan*	*Program Pengawasan Keamanan Pangan*	Sesuai	1
	Pertanahan	**Pertanahan**		
52	*Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan*	*Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan*	Sesuai	1
53	*Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan*	*Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan*	Sesuai	1
	Lingkungan Hidup	**Lingkungan Hidup**		
54	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
55	*Program Perencanaan Lingkungan Hidup*	*Program Perencanaan Lingkungan Hidup*	Sesuai	1
56	*Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	*Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	Sesuai	1
57	*Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)*	*Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)*	Sesuai	1

58	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*	Sesuai	1
59	*Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	*Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	Sesuai	1
60	*Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	*Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	Sesuai	1
61	*Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup*	*Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup*	Sesuai	1
62	*Program Pengelolaan Persampahan*	*Program Pengelolaan Persampahan*	Sesuai	1
	Administrasi Kependudukan dan Capil	**Administrasi Kependudukan dan Capil**		
63	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
64	*Program Pendaftaran Penduduk*	*Program Pendaftaran Penduduk*	Sesuai	1
65	*Program Pencatatan Sipil*	*Program Pencatatan Sipil*	Sesuai	1
66	*Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Sesuai	1
67	*Program Pengelolaan Profil Kependudukan*	*Program Pengelolaan Profil Kependudukan*	Sesuai	1
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**		
68	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
69	*Program Penataan Desa*	*Program Penataan Desa*	Sesuai	1
70	*Program Peningkatan Kerjasama Desa*	*Program Peningkatan Kerjasama Desa*	Sesuai	1
71	*Program Administrasi Pemerintahan Desa*	*Program Administrasi Pemerintahan Desa*	Sesuai	1
72	*Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat*	*Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat*	Sesuai	1
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
73	*Program Pengendalian Penduduk*	*Program Pengendalian Penduduk*	Sesuai	1

74	*Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*	*Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*	Sesuai	1
75	*Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)*	*Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)*	Sesuai	1
	Perhubungan	**Perhubungan**		
76	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
77	*Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*	*Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*	Sesuai	1
78	*Program Pengelolaan Pelayaran*	*Program Pengelolaan Pelayaran*	Sesuai	1
	Komunikasi dan Informatika	**Komunikasi dan Informatika**		
79	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
80	*Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik*	*Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik*	Sesuai	1
81	*Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*	*Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*	Sesuai	1
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		
82	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
83	*Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam*	*Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam*	Sesuai	1
84	*Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi*	*Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi*	Sesuai	1
85	*Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi*	*Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi*	Sesuai	1
86	*Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian*	*Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian*	Sesuai	1
87	*Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi*	*Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi*	Sesuai	1
88	*Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)*	*Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)*	Sesuai	1
89	*Program Pengembangan UMKM*	*Program Pengembangan UMKM*	Sesuai	1
	Penanaman Modal	**Penanaman Modal**		
90	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1

91	*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*	*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*	Sesuai	1
92	*Program Promosi Penanaman Modal*	*Program Promosi Penanaman Modal*	Sesuai	1
93	*Program Pelayanan Penanaman Modal*	*Program Pelayanan Penanaman Modal*	Sesuai	1
94	*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	Sesuai	1
95	*Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	*Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	Sesuai	1
	Kepemudaan dan Olah Raga	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
96	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan*	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan*	Sesuai	1
97	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan*	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan*	Sesuai	1
98	*Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*	*Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*	Sesuai	1
	Statistik	**Statistik**		
99	*Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*	*Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*	Sesuai	1
	Persandian	**Persandian**		
100	*Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi*	*Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi*	Sesuai	1
	Kebudayaan	**Kebudayaan**		
101	*Program Pengembangan Kebudayaan*	*Program Pengembangan Kebudayaan*	Sesuai	1
102	*Program Pengembangan Kesenian Tradisional*	*Program Pengembangan Kesenian Tradisional*	Sesuai	1
103	*Program Pembinaan Sejarah*	*Program Pembinaan Sejarah*	Sesuai	1
104	*Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya*	*Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya*	Sesuai	1
105	*Program Pengelolaan Permuseuman*	*Program Pengelolaan Permuseuman*	Sesuai	1
	Perpustakaan	**Perpustakaan**		
106	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
107	*Program Pembinaan Perpustakaan*	*Program Pembinaan Perpustakaan*	Sesuai	1
	Kearsipan	**Kearsipan**		
108	*Program Pengelolaan Arsip*	*Program Pengelolaan Arsip*	Sesuai	1

109	*Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip*	*Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip*	Sesuai	1
110	*Program Perizinan Penggunaan Arsip*	*Program Perizinan Penggunaan Arsip*	Sesuai	1
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
	Kelautan dan Perikanan	**Kelautan dan Perikanan**		
111	*Program Pengelolaan Perikanan Tangkap*	*Program Pengelolaan Perikanan Tangkap*	Sesuai	1
112	*Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*	*Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*	Sesuai	1
113	*Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*	*Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*	Sesuai	1
114	*Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan*	*Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan*	Sesuai	1
	Pariwisata	**Pariwisata**		
115	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
116	*Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata*	*Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata*	Sesuai	1
117	*Program Pemasaran Pariwisata*	*Program Pemasaran Pariwisata*	Sesuai	1
118	*Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*	*Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*	Sesuai	1
119	*Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*	*Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*	Sesuai	1
	Pertanian	**Pertanian**		
120	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Sesuai	1
121	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian*	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian*	Sesuai	1
122	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian*	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian*	Sesuai	1
123	*Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*	*Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*	Sesuai	1
124	*Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian*	*Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian*	Sesuai	1
125	*Program Perizinan Usaha Pertanian*	*Program Perizinan Usaha Pertanian*	Sesuai	1
126	*Program Penyuluhan*	*Program Penyuluhan*	Sesuai	1

	Pertanian	*Pertanian*		
	Perdagangan	**Perdagangan**		
127	*Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan*	*Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan*	Sesuai	1
128	*Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan*	*Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan*	Sesuai	1
129	*Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting*	*Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting*	Sesuai	1
130	*Program Pengembangan Ekspor*	*Program Pengembangan Ekspor*	Sesuai	1
131	*Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen*	*Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen*	Sesuai	1
132	*Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri*	*Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri*	Sesuai	1
	Perindustrian	**Perindustrian**		
133	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
134	*Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri*	*Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri*	Sesuai	1
135	*Program Pengendalian Izin Usaha Industri*	*Program Pengendalian Izin Usaha Industri*	Sesuai	1
136	*Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*	*Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*	Sesuai	1
	Transmigrasi	**Transmigrasi**		
137	*Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	*Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	Sesuai	1
D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
	Sekreatriat Daerah	**Sekreatriat Daerah**		
138	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
139	*Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat*	*Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat*	Sesuai	1
140	*Program Perekonomian Dan Pembangunan*	*Program Perekonomian Dan Pembangunan*	Sesuai	1
	Sekretariat DPRD	**Sekretariat DPRD**		
141	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
142	*Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD*	*Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD*	Sesuai	1

E	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
	Perencanaan	**Perencanaan**		
143	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
144	*Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah*	*Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah*	Sesuai	1
145	*Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*	Sesuai	1
	Keuangan	**Keuangan**		
146	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
147	*Program Pengelolaan Keuangan Daerah*	*Program Pengelolaan Keuangan Daerah*	Sesuai	1
148	*Program Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*Program Pengelolaan Barang Milik Daerah*	Sesuai	1
149	*Program Pengelolaan Pendapatan Daerah*	*Program Pengelolaan Pendapatan Daerah*	Sesuai	1
	Kepegawaian	**Kepegawaian**		
150	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
151	*Program Kepegawaian Daerah*	*Program Kepegawaian Daerah*	Sesuai	1
	Pendidikan dan Pelatihan	**Pendidikan dan Pelatihan**		
152	*Program Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*Program Pengembangan Sumber Daya Manusia*	Sesuai	1
	Penelitian dan Pengembangan	**Penelitian dan Pengembangan**		
153	*Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah*	*Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah*	Sesuai	1
F	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
	Inspektorat	**Inspektorat**		
154	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
155	*Program Penyelenggaraan*	*Program Penyelenggaraan*	Sesuai	1

	Pengawasan	*Pengawasan*		
156	*Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi*	*Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi*	Sesuai	1
G	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**		
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	**Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)**		
157	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
158	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*	Sesuai	1
159	*Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*	*Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*	Sesuai	1
160	*Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	*Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	Sesuai	1
161	*Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	*Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	Sesuai	1
162	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Sesuai	1
H	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	**Kesatuan Bangsa dan Politik**		
163	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
164	*Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan*	*Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan*	Sesuai	1
165	*Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik*	*Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik*	Sesuai	1
166	*Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	*Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	Sesuai	1
167	*Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*	*Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*	Sesuai	1
168	*Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial*	*Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial*	Sesuai	1
TOTAL SKOR/ NILAI				**168**

Jumlah Sesuai : 168

Jumlah Tidak Sesuai : 0

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program

= 168 / 168

= 1

c. Kesesuaian Nomenklatur Program KUA PPAS dan APBD

NO.	KUA PPAS	APBD	SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
	URUSAN/ PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM		
1	2	3	4	5
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
	Pendidikan	**Pendidikan**		
1	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
2	*Program Pengelolaan Pendidikan*	*Program Pengelolaan Pendidikan*	Sesuai	1
3	*Program Pengembangan Kurikulum*	*Program Pengembangan Kurikulum*	Sesuai	1
4	*Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*	*Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*	Sesuai	1
5	*Program Pengendalian Perizinan Pendidikan*	*Program Pengendalian Perizinan Pendidikan*	Sesuai	1
	Kesehatan	**Kesehatan**		
6	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
7	*Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	*Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat*	Sesuai	1
8	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*	Sesuai	1
9	*Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman*	*Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman*	Sesuai	1
10	*Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*	*Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*	Sesuai	1
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		

11	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
12	*Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*	*Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*	Sesuai	1
13	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*	Sesuai	1
14	*Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional*	*Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional*	Sesuai	1
15	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah*	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah*	Sesuai	1
16	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase*	*Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase*	Sesuai	1
17	*Program Penataan Bangunan Gedung*	*Program Penataan Bangunan Gedung*	Sesuai	1
18	*Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya*	*Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya*	Sesuai	1
19	*Program Penyelenggaraan Jalan*	*Program Penyelenggaraan Jalan*	Sesuai	1
20	*Program Pengembangan Jasa Konstruksi*	*Program Pengembangan Jasa Konstruksi*	Sesuai	1
21	*Program Penyelenggaraan Penataan Ruang*	*Program Penyelenggaraan Penataan Ruang*	Sesuai	1
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**		
22	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
23	*Program Pengembangan Perumahan*	*Program Pengembangan Perumahan*	Sesuai	1
24	*Program Kawasan Permukiman*	*Program Kawasan Permukiman*	Sesuai	1
25	*Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)*	*Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)*	Sesuai	1
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**		
26	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
27	*Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*	*Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*	Sesuai	1
28	*Program Penanggulangan Bencana*	*Program Penanggulangan Bencana*	Sesuai	1
29	*Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran*	*Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran*	Sesuai	1

	Sosial	**Sosial**		
30	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
31	*Program Pemberdayaan Sosial*	*Program Pemberdayaan Sosial*	Sesuai	1
32	*Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan*	*Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan*	Sesuai	1
33	*Program Rehabilitasi Sosial*	*Program Rehabilitasi Sosial*	Sesuai	1
34	*Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial*	*Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial*	Sesuai	1
35	*Program Penanganan Bencana*	*Program Penanganan Bencana*	Sesuai	1
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
	Tenaga Kerja	**Tenaga Kerja**		
36	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
37	*Program Perencanaan Tenaga Kerja*	*Program Perencanaan Tenaga Kerja*	Sesuai	1
38	*Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja*	*Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja*	Sesuai	1
39	*Program Penempatan Tenaga Kerja*	*Program Penempatan Tenaga Kerja*	Sesuai	1
40	*Program Hubungan Industrial*	*Program Hubungan Industrial*	Sesuai	1
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
41	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
42	*Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan*	*Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan*	Sesuai	1
43	*Program Perlindungan Perempuan*	*Program Perlindungan Perempuan*	Sesuai	1
44	*Program Peningkatan Kualitas Keluarga*	*Program Peningkatan Kualitas Keluarga*	Sesuai	1
45	*Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak*	*Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak*	Sesuai	1
46	*Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)*	*Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)*	Sesuai	1
47	*Program Perlindungan Khusus Anak*	*Program Perlindungan Khusus Anak*	Sesuai	1
	Pangan	**Pangan**		

48	*Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan*	*Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan*	Sesuai	1
49	*Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat*	*Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat*	Sesuai	1
50	*Program Penanganan Kerawanan Pangan*	*Program Penanganan Kerawanan Pangan*	Sesuai	1
51	*Program Pengawasan Keamanan Pangan*	*Program Pengawasan Keamanan Pangan*	Sesuai	1
	Pertanahan	**Pertanahan**		
52	*Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan*	*Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan*	Sesuai	1
53	*Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan*	*Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan*	Sesuai	1
	Lingkungan Hidup	**Lingkungan Hidup**		
54	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
55	*Program Perencanaan Lingkungan Hidup*	*Program Perencanaan Lingkungan Hidup*	Sesuai	1
56	*Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	*Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	Sesuai	1
57	*Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)*	*Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)*	Sesuai	1
58	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*	Sesuai	1
59	*Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	*Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	Sesuai	1
60	*Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	*Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat*	Sesuai	1
61	*Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup*	*Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup*	Sesuai	1
62	*Program Pengelolaan Persampahan*	*Program Pengelolaan Persampahan*	Sesuai	1
	Administrasi Kependudukan dan Capil	**Administrasi Kependudukan dan Capil**		

63	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
64	*Program Pendaftaran Penduduk*	*Program Pendaftaran Penduduk*	Sesuai	1
65	*Program Pencatatan Sipil*	*Program Pencatatan Sipil*	Sesuai	1
66	*Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	Sesuai	1
67	*Program Pengelolaan Profil Kependudukan*	*Program Pengelolaan Profil Kependudukan*	Sesuai	1
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**		
68	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
69	*Program Penataan Desa*	*Program Penataan Desa*	Sesuai	1
70	*Program Peningkatan Kerjasama Desa*	*Program Peningkatan Kerjasama Desa*	Sesuai	1
71	*Program Administrasi Pemerintahan Desa*	*Program Administrasi Pemerintahan Desa*	Sesuai	1
72	*Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat*	*Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat*	Sesuai	1
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
73	*Program Pengendalian Penduduk*	*Program Pengendalian Penduduk*	Sesuai	1
74	*Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*	*Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*	Sesuai	1
75	*Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)*	*Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)*	Sesuai	1
	Perhubungan	**Perhubungan**		
76	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
77	*Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*	*Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)*	Sesuai	1
78	*Program Pengelolaan Pelayaran*	*Program Pengelolaan Pelayaran*	Sesuai	1
	Komunikasi dan Informatika	**Komunikasi dan Informatika**		
79	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
80	*Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik*	*Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik*	Sesuai	1

81	*Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*	*Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*	Sesuai	1
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		
82	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
83	*Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam*	*Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam*	Sesuai	1
84	*Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi*	*Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi*	Sesuai	1
85	*Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi*	*Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi*	Sesuai	1
86	*Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian*	*Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian*	Sesuai	1
87	*Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi*	*Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi*	Sesuai	1
88	*Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)*	*Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)*	Sesuai	1
89	*Program Pengembangan UMKM*	*Program Pengembangan UMKM*	Sesuai	1
	Penanaman Modal	**Penanaman Modal**		
90	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
91	*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*	*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*	Sesuai	1
92	*Program Promosi Penanaman Modal*	*Program Promosi Penanaman Modal*	Sesuai	1
93	*Program Pelayanan Penanaman Modal*	*Program Pelayanan Penanaman Modal*	Sesuai	1
94	*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	*Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*	Sesuai	1
95	*Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	*Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal*	Sesuai	1
	Kepemudaan dan Olah Raga	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
96	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan*	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan*	Sesuai	1
97	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan*	*Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan*	Sesuai	1
98	*Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*	*Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*	Sesuai	1

	Statistik	**Statistik**		
99	*Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*	*Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*	Sesuai	1
	Persandian	**Persandian**		
100	*Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi*	*Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi*	Sesuai	1
	Kebudayaan	**Kebudayaan**		
101	*Program Pengembangan Kebudayaan*	*Program Pengembangan Kebudayaan*	Sesuai	1
102	*Program Pengembangan Kesenian Tradisional*	*Program Pengembangan Kesenian Tradisional*	Sesuai	1
103	*Program Pembinaan Sejarah*	*Program Pembinaan Sejarah*	Sesuai	1
104	*Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya*	*Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya*	Sesuai	1
105	*Program Pengelolaan Permuseuman*	*Program Pengelolaan Permuseuman*	Sesuai	1
	Perpustakaan	**Perpustakaan**		
106	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
107	*Program Pembinaan Perpustakaan*	*Program Pembinaan Perpustakaan*	Sesuai	1
	Kearsipan	**Kearsipan**		
108	*Program Pengelolaan Arsip*	*Program Pengelolaan Arsip*	Sesuai	1
109	*Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip*	*Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip*	Sesuai	1
110	*Program Perizinan Penggunaan Arsip*	*Program Perizinan Penggunaan Arsip*	Sesuai	1
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
	Kelautan dan Perikanan	**Kelautan dan Perikanan**		
111	*Program Pengelolaan Perikanan Tangkap*	*Program Pengelolaan Perikanan Tangkap*	Sesuai	1
112	*Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*	*Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*	Sesuai	1
113	*Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*	*Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*	Sesuai	1
114	*Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan*	*Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan*	Sesuai	1
	Pariwisata	**Pariwisata**		
115	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1

116	*Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata*	*Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata*	Sesuai	1
117	*Program Pemasaran Pariwisata*	*Program Pemasaran Pariwisata*	Sesuai	1
118	*Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*	*Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*	Sesuai	1
119	*Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*	*Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*	Sesuai	1
	Pertanian	**Pertanian**		
120	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Sesuai	1
121	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian*	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian*	Sesuai	1
122	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian*	*Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian*	Sesuai	1
123	*Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*	*Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*	Sesuai	1
124	*Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian*	*Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian*	Sesuai	1
125	*Program Perizinan Usaha Pertanian*	*Program Perizinan Usaha Pertanian*	Sesuai	1
126	*Program Penyuluhan Pertanian*	*Program Penyuluhan Pertanian*	Sesuai	1
	Perdagangan	**Perdagangan**		
127	*Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan*	*Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan*	Sesuai	1
128	*Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan*	*Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan*	Sesuai	1
129	*Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting*	*Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting*	Sesuai	1
130	*Program Pengembangan Ekspor*	*Program Pengembangan Ekspor*	Sesuai	1
131	*Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen*	*Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen*	Sesuai	1
132	*Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri*	*Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri*	Sesuai	1
	Perindustrian	**Perindustrian**		
133	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
134	*Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri*	*Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri*	Sesuai	1

135	*Program Pengendalian Izin Usaha Industri*	*Program Pengendalian Izin Usaha Industri*	Sesuai	1
136	*Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*	*Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*	Sesuai	1
	Transmigrasi	**Transmigrasi**		
137	*Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	*Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi*	Sesuai	1
D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
	Sekreatriat Daerah	**Sekreatriat Daerah**		
138	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
139	*Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat*	*Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat*	Sesuai	1
140	*Program Perekonomian Dan Pembangunan*	*Program Perekonomian Dan Pembangunan*	Sesuai	1
	Sekretariat DPRD	**Sekretariat DPRD**		
141	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
142	*Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD*	*Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD*	Sesuai	1
E	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
	Perencanaan	**Perencanaan**		
143	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
144	*Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah*	*Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah*	Sesuai	1
145	*Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*	Sesuai	1
	Keuangan	**Keuangan**		
146	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
147	*Program Pengelolaan Keuangan Daerah*	*Program Pengelolaan Keuangan Daerah*	Sesuai	1
148	*Program Pengelolaan Barang Milik Daerah*	*Program Pengelolaan Barang Milik Daerah*	Sesuai	1
149	*Program Pengelolaan Pendapatan Daerah*	*Program Pengelolaan Pendapatan Daerah*	Sesuai	1

	Kepegawaian	**Kepegawaian**		
150	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
151	*Program Kepegawaian Daerah*	*Program Kepegawaian Daerah*	Sesuai	1
	Pendidikan dan Pelatihan	**Pendidikan dan Pelatihan**		
152	*Program Pengembangan Sumber Daya Manusia*	*Program Pengembangan Sumber Daya Manusia*	Sesuai	1
	Penelitian dan Pengembangan	**Penelitian dan Pengembangan**		
153	*Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah*	*Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah*	Sesuai	1
F	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
	Inspektorat	**Inspektorat**		
154	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
155	*Program Penyelenggaraan Pengawasan*	*Program Penyelenggaraan Pengawasan*	Sesuai	1
156	*Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi*	*Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi*	Sesuai	1
G	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**UNSUR KEWILAYAHAN**		
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	**Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)**		
157	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
158	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*	Sesuai	1
159	*Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*	*Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*	Sesuai	1
160	*Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	*Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	Sesuai	1
161	*Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	*Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	Sesuai	1
162	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Sesuai	1
H	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		

	Kesatuan Bangsa dan Politik	**Kesatuan Bangsa dan Politik**		
163	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	Sesuai	1
164	*Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan*	*Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan*	Sesuai	1
165	*Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik*	*Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik*	Sesuai	1
166	*Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	*Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	Sesuai	1
167	*Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*	*Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*	Sesuai	1
168	*Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial*	*Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial*	Sesuai	1
TOTAL SKOR/ NILAI				**168**

Jumlah Sesuai : 168

Jumlah Tidak Sesuai : 0

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program

= 168 / 168

= 1

d. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA PPAS

RKPD		KUA-PPAS		SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR / NILAI
URUSAN	PAGU	URUSAN	PAGU		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Pendidikan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	636.756.639.615,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	633.042.626.601,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Pendidikan	166.722.706.175,00	Program Pengelolaan Pendidikan	169.342.387.975,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kurikulum	464.042.500,00	Program Pengembangan Kurikulum	316.970.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	17.128.211.100,00	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	16.012.441.000,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	60.572.000,00	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	60.572.000,00	Sesuai	1
Kesehatan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	365.458.282.883,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	425.871.452.626,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	121.980.352.189,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	131.261.852.133,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.959.461.750,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.638.639.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	768.184.000,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	236.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.236.834.421	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.569.330.121,00	Tidak Sesuai	0
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.423.767.849,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.604.972.665,00	Tidak Sesuai	0

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	41.645.908.000,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	40.690.165.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.211.717.328,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.874.856.344,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	210.890.000,00	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	203.630.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.515.803.192,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.879.038.241,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	36.570.608.000,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	44.597.412.815,00	Tidak Sesuai	0
Program Penataan Bangunan Gedung	4.254.610.000,00	Program Penataan Bangunan Gedung	6.162.833.924,00	Tidak Sesuai	0
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	385.901.300,00	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	620.066.738,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Jalan	148.573.712.715,00	Program Penyelenggaraan Jalan	120.408.367.622,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	93.080.750,00	Sesuai	1
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	673.065.540,00	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.243.296.920,00	Tidak Sesuai	0
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.510.994.638,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.156.722.598,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Perumahan	347.377.114,00	Program Pengembangan Perumahan	347.377.114,00	Sesuai	1
Program Kawasan Permukiman	41.771.293.087,00	Program Kawasan Permukiman	45.883.073.087,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	121.061.697,00	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	121.061.697,00	Sesuai	1
Pertanahan					
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	429.800.000,00	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	429.800.000,00	Sesuai	1
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	166.616.800,00	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	166.616.800,00	Sesuai	1
Ketentraman dan					

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.181.445.174,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.213.902.514,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.631.631.000,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.856.631.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanggulangan Bencana	15.093.255.120,00	Program Penanggulangan Bencana	15.013.209.120,00	Tidak Sesuai	0
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	748.928.826,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.093.928.826,00	Tidak Sesuai	0
Sosial					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.848.867.175,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.210.259.948,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Sosial	2.576.983.500,00	Program Pemberdayaan Sosial	1.714.065.200,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100.000.000,00	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	4.360.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Rehabilitasi Sosial	932.182.941,00	Program Rehabilitasi Sosial	296.896.400,00	Tidak Sesuai	0
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.219.764.079,00	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.024.777.802,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanganan Bencana	1.312.735.663,00	Program Penanganan Bencana	402.912.000,00	Tidak Sesuai	0
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.009.552.335,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.230.568.655,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Tenaga Kerja	0,00	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0,00	Sesuai	1
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.075.783.300,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.645.783.300,00	Tidak Sesuai	0
Program Penempatan Tenaga Kerja	3.013.861.571,00	Program Penempatan Tenaga Kerja	4.733.861.571,00	Tidak Sesuai	0

Program Hubungan Industrial	667.679.794,00	Program Hubungan Industrial	767.679.794,00	Tidak Sesuai	0
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.087.486.813,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.883.008.163,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	357.950.859,00	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	361.041.909,00	Tidak Sesuai	0
Program Perlindungan Perempuan	53.128.653,00	Program Perlindungan Perempuan	51.849.603,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	49.996.500,00	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	46.396.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	30.000.000,00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	28.188.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	161.479.269,00	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	169.833.269,00	Tidak Sesuai	0
Program Perlindungan Khusus Anak	74.704.000,00	ProgramPerlindungan Khusus Anak	69.950.000,00	Tidak Sesuai	0
Pangan					
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	181.000.000,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	120.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.321.200.000,00	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.321.200.000,00	Sesuai	1
Program Penanganan Kerawanan Pangan	44.000.300,00	Program Penanganan Kerawanan Pangan	44.000.300,00	Sesuai	1
Program Pengawasan Keamanan Pangan	34.500.000,00	Program Pengawasan Keamanan Pangan	34.500.000,00	Sesuai	1
Lingkungan Hidup					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.619.692.100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.534.530.912,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	160.000.000,00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	160.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11.341.667.755,00	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10.598.003.985,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.621.125.856,00	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.617.125.856,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	20.000.000,00	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	20.000.000,00	Sesuai	1

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	218.801.755,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	325.744.755,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.148.100.000,00	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.645.964.320,00	Tidak Sesuai	0
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	10.000.000,00	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	9.334.450,00	Sesuai	1
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Persampahan	9.094.180.934,00	Program Pengelolaan Persampahan	9.199.869.542,00	Tidak Sesuai	0
Administrasi Kependudukan dan Capil					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.774.692.548,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.433.931.898,00	Tidak Sesuai	0
Program Pendaftaran Penduduk	1.316.067.000,00	Program Pendaftaran Penduduk	1.282.987.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pencatatan Sipil	81.105.000,00	Program Pencatatan Sipil	68.052.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.833.899.000,00	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.849.796.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	46.490.000,00	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	46.490.000,00	Sesuai	1
Pemberdayaan Masyarakat Desa					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.880.400.200,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.635.370.420,00	Tidak Sesuai	0
Program Penataan Ds	0,00	Program Penataan Desa	0,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Kerjasama Desa	275.000.000,00	Program Peningkatan Kerjasama Desa	875.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.008.248.300,00	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.008.248.300,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.800.603.500,00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.800.603.500,00	Sesuai	1
Pengendalian					

Penduduk dan Keluarga Berencana					
Program Pengendalian Penduduk	477.677.500,00	Program Pengendalian Penduduk	477.677.500,00	Sesuai	1
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.554.093.000,00	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.554.093.000,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.317.240.004,00	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.317.240.004,00	Sesuai	1
Program Perlindungan Perempuan	86.028.912,00	Program Perlindungan Perempuan	86.028.912,00	Sesuai	1
Perhubungan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.283.470.762,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.731.645.673,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.127.699.388,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.087.034.177,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Pelayaran	17.468.250,00	Program Pengelolaan Pelayaran	17.168.250,00	Tidak Sesuai	0
Komunikasi Informatika					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.371.530.239,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.354.649.320,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.585.287.164,00	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.697.511.334,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.742.630.000,00	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.961.758.100,00	Tidak Sesuai	0
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.164.047.080,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.091.775.480,00	Tidak Sesuai	0
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	74.120.000,00	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	74.120.000,00	Sesuai	1
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	148.755.600,00	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	142.270.600,00	Tidak Sesuai	0
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0,00	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0,00	Sesuai	1
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	165.613.800,00	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	552.693.800,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	543.301.400,00	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	413.807.400,00	Tidak Sesuai	0

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	886.435.040,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	476.265.040,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan UMKM	998.933.080,00	Program Pengembangan UMKM	972.628.750,00	Tidak Sesuai	0
Penanaman Modal					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.678.010.700,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.494.138.550,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	298.309.600,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	298.309.600,00	Sesuai	1
Program Promosi Penanaman Modal	424.843.800,00	Program Promosi Penanaman Modal	424.843.800,00	Sesuai	1
Program Pelayanan Penanaman Modal	198.516.200,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	198.516.200,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	350.242.300,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	350.242.300,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	111.703.400,00	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70.295.400,00	Tidak Sesuai	0
Kepemudaan dan Olah Raga					
Program Pengemb Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	448.971.000,00	Program Pengemb Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.024.368.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.131.834.000,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.003.611.550,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	863.910.000,00	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	833.675.000,00	Tidak Sesuai	0
Statistik					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	870.674.848,00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	870.674.848,00	Sesuai	1
Persandian					
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	119.259.400,00	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	125.951.499,00	Tidak Sesuai	0
Kebudayaan					
Program Pengembangan Kebudayaan	885.000.000,00	Program Pengembangan Kebudayaan	885.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	310.000.000,00	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	751.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Sejarah	0,00	Program Pembinaan Sejarah	0,00	Sesuai	1

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	0,00	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	25.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Permuseuman	805.000.000,00	Program Pengelolaan Permuseuman	805.000.000,00	Sesuai	1
Perpustakaan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.289.180.489,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.970.401.789,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Perpustakaan	598.321.861,00	Program Pembinaan Perpustakaan	748.321.861,00	Tidak Sesuai	0
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	6.791.650,00	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	6.791.650,00	Sesua i	1
Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip	254.920.000,00		239.920.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	5.080.000,00	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	5.080.000,00	Sesuai	1
Program Perizinan Penggunaan Arsip	0	Program Perizinan Penggunaan Arsip	0,00	Sesuai	1
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Kelautan dan Perikanan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.070.855.050,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.802.752.260,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	773.518.000,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	773.518.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	541.154.600,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	574.904.600,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	3.999.800,00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	3.999.800,00	Sesuai	1
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	453.435.400,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	453.435.400,00	Sesuai	1
Pariwisata					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.004.634.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.313.951.030,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.008.543.000,00	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.608.543.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemasaran Pariwisata	1.090.312.000,00	Program Pemasaran Pariwisata	1.090.312.000,00	Sesuai	1

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	55.000.000,00	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	55.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.390.000.000,00	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.190.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Pertanian					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.946.506.310,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.951.822.315,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	14.382.232.800,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.004.182.435,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	19.622.067.400,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	23.318.532.900,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	434.076.050,00	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	434.076.050,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	709.070.400,00	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	520.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyuluhan Pertanian	7.028.454.100,00	Program Penyuluhan Pertanian	8.246.886.100,00	Tidak Sesuai	0
Program Perizinan Usaha pertanian	4.830.000,00	Program Perizinan Usaha pertanian	4.830.000,00	Sesuai	1
Perdagangan					
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	14.805.000,00	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.880.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.145.952.997,00	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.590.952.997,00	Tidak Sesuai	0
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	204.102.000,00	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	210.527.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Ekspor	461.540.000,00	Program Pengembangan Ekspor	484.040.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	185.855.650,00	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	185.855.650,00	Sesuai	1
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	14.625.000,00	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	13.625.000,00	Tidak Sesuai	0
Perindustrian					

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.400.490.453,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.185.622.543,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.664.267.900,00	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.729.267.900,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	20.000.000,00	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	20.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.000.000,00	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	80.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Transmigrasi		**Transmigrasi**			
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	135.300.000	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	135.300.000	Sesuai	1
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Sekretariat Daerah					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.680.677.200,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.680.677.200,00	Sesuai	1
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8.892.904.000,00	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8.892.904.000,00	Sesuai	1
Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.627.011.000,00	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.627.011.000,00	Sesuai	1
Sekretariat DPRD					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.608.025.400,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.245.968.062,00	Tidak Sesuai	0
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.593.455.600,00	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	48.632.788.551,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Perencanaan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.825.502.840,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.887.434.136,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.776.167.200,00	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.090.207.750,00	Tidak Sesuai	0
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.576.477.160,00	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.340.640.880,00	Tidak Sesuai	0

Keuangan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.423.011.220,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.238.792.909,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	405.003.109.161,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	389.789.229.872,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.602.012.400,00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.147.323.300,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.878.478.521,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.137.924.875,00	Tidak Sesuai	0
Kepegawaian					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.355.676.531,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.794.311.703,00	Tidak Sesuai	0
Program Kepegawaian Daerah	1.946.481.719,00	Program Kepegawaian Daerah	2.925.394.700,00	Tidak Sesuai	0
Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.036.213.750,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.411.561.560,00	Tidak Sesuai	0
Penelitian dan Pengembangan					
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.212.700.000,00	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.192.298.000,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
Inspektorat					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.934.623.370,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.559.011.254,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.529.596.115,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.873.504.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.476.910.115,00	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.574.639.000,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR KEWILAYAHAN					
Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64.575.887.617,64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.778.425.967,64	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	280.874.400,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	258.519.400,00	Tidak Sesuai	0

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.990.637.239,36	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.958.012.789,36	Tidak Sesuai	0
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.056.240.700,00	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	507.723.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	610.941.400,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	590.716.800,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.186.022.600,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.156.210.100,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
Kesatuan Bangsa dan Politik					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.161.948.250,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.306.008.218,00	Tidak Sesuai	0
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.195.132.750,00	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	329.592.550,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	36.961.865.200,00	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budpol	2.372.155.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.514.470.000,00	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.285.637.512,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	210.467.000,00	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	234.327.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	618.352.000,00	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	199.212.500,00	Tidak Sesuai	0
TOTAL SKOR/ NILAI					**48**

Jumlah Sesuai : 48

Jumlah Tidak Sesuai : 120

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program

= 48 / 168

= 0,28

e. Kesesuaian Pagu Program KUA PPAS dan APBD

KUA PPAS		APBD		SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR / NILAI
URUSAN	PAGU	URUSAN	PAGU		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Pendidikan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	633.042.626.601,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	626.381.427.932,00		
Program Pengelolaan Pendidikan	169.342.387.975,00	Program Pengelolaan Pendidikan	172.078.062.975,00		
Program Pengembangan Kurikulum	316.970.000,00	Program Pengembangan Kurikulum	495.130.500,00		
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	16.012.441.000,00	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	16.012.441.000,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	60.572.000,00	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	60.572.000,00	Sesuai	1
Kesehatan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	425.871.452.626,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	414.325.923.158,00		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	131.261.852.133,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	130.782.552.133,00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.638.639.500,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	5.959.461.750,00		

		Daya Manusia Kesehatan			
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	236.000.000,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	768.184.000,00		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.569.330.121,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.569.330.121,00	Sesuai	1
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.604.972.665,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.059.059.079,00		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	40.690.165.000,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	55.593.095.020,00		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.874.856.344,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.020.717.328,00		
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	203.630.000,00	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	210.890.000,00		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.879.038.241,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.220.012.980,00		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	44.597.412.815,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	51.000.374.490,00		
Program Penataan Bangunan Gedung	6.162.833.924,00	Program Penataan Bangunan Gedung	4.261.081.000,00		
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	620.066.738,00	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	410.901.300,00		
Program Penyelenggaraan Jalan	120.408.367.622,00	Program Penyelenggaraan Jalan	153.075.288.205,00		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	93.080.750,00	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000,00		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.243.296.920,00	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	673.065.540,00		
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.156.722.598,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.004.722.598,00		
Program Pengembangan Perumahan	347.377.114,00	Program Pengembangan Perumahan	347.377.114,00	Sesuai	1
Program Kawasan Permukiman	45.883.073.087,00	Program Kawasan Permukiman	47.115.073.087,00		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	121.061.697,00	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	218.561.697,00		
Pertanahan					
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	429.800.000,00	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	166.616.800,00	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.213.902.514,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.747.519.604,00		
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.856.631.000,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.722.959.700,00		
Program Penanggulangan Bencana	15.013.209.120,00	Program Penanggulangan Bencana	15.705.709.120,00		
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.093.928.826,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	785.075.826,00		
Sosial					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.210.259.948,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.037.864.271,00		
Program Pemberdayaan Sosial	1.714.065.200,00	Program Pemberdayaan Sosial	1.664.065.200,00		

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	4.360.000,00	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	4.360.000,00	Sesuai	1
Program Rehabilitasi Sosial	296.896.400,00	Program Rehabilitasi Sosial	296.935.900,00		
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.024.777.802,00	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.924.981.979,00		
Program Penanganan Bencana	402.912.000,00	Program Penanganan Bencana	545.064.000		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.230.568.655,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.555.428.655,00		
Program Perencanaan Tenaga Kerja	0,00	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0,00	Sesuai	1
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.645.783.300,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.675.783.300,00		
Program Penempatan Tenaga Kerja	4.733.861.571,00	Program Penempatan Tenaga Kerja	4.083.861.571,00		
Program Hubungan Industrial	767.679.794,00	Program Hubungan Industrial	762.819.794,00		
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.883.008.163,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.883.008.163,00	Sesuai	1
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	361.041.909,00	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	361.041.909,00	Sesuai	1
Program Perlindungan Perempuan	51.849.603,00	Program Perlindungan Perempuan	137.878.515,00		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	46.396.500,00	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	46.396.500,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	28.188.000,00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	28.188.000,00	Sesuai	1
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	169.833.269,00	Program Pemenuhan Hak	169.833.269,00	Sesuai	1

		Anak (PHA)			
Program Perlindungan Khusus Anak	69.950.000,00	ProgramPerlindungan Khusus Anak	179.408.490,00		
Pangan					
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	120.000.000,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	120.000.000,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.321.200.000,00	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.721.200.000,00		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	44.000.300,00	Program Penanganan Kerawanan Pangan	44.000.300,00	Sesuai	1
Program Pengawasan Keamanan Pangan	34.500.000,00	Program Pengawasan Keamanan Pangan	34.500.000,00	Sesuai	1
Lingkungan Hidup					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.534.530.912,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.534.491.028,00		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	160.000.000,00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	160.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10.598.003.985,00	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10.798.042.560,00		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.617.125.856,00	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.617.125.856,00	Sesuai	1
Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	20.000.000,00	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	20.000.000,00	Sesuai	1
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	325.744.755,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	325.746.055,00		
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.645.964.320,00	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	2.835.964.329,00		

		Untuk Masyarakat			
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	9.334.450,00	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	9.334.450,00	Sesuai	1
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Persampahan	9.199.869.542,00	Program Pengelolaan Persampahan	8.009.869.542,00		
Administrasi Kependudukan dan Capil					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	424.843.800,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.433.931.898,00		
Program Pendaftaran Penduduk	198.516.200,00	Program Pendaftaran Penduduk	1.282.987.000,00		
Program Pencatatan Sipil	350.242.300,00	Program Pencatatan Sipil	68.052.000,00		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	70.295.400,00	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.849.796.000,00		
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	46.490.000,00	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	46.490.000,00	Sesuai	1
Pemberdayaan Masyarakat Desa					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.003.611.550,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.635.370.420,00		
Program Penataan Ds	833.675.000,00	Program Penataan Desa	0,00		
Program Peningkatan Kerjasama Desa	4.375.000.000,00	Program Peningkatan Kerjasama Desa	875.000.000,00		
Program Administrasi Pemerintahan Desa	870.674.848,00	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.200.248.300,00		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.800.603.500,00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.800.603.500,00	Sesuai	1
Pengendalian Penduduk dan					

Keluarga Berencana					
Program Pengendalian Penduduk	477.677.500,00	Program Pengendalian Penduduk	477.677.500,00	Sesuai	1
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	885.000.000,00	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.554.093.000,00		
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	751.000.000,00	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.317.240.004,00		
Program Perlindungan Perempuan	155.548.809,00	Program Perlindungan Perempuan	51.849.603,00		
Perhubungan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.731.645.673,00	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	37.748.942.673,00		
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.087.034.177,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.305.139.177,00		
Program Pengelolaan Pelayaran	17.168.250,00	Program Pengelolaan Pelayaran	17.168.250,00	Sesuai	1
Komunikasi Informatika					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.354.649.320,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.354.894.051,00		
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.697.511.334,00	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.697.511.334,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.961.758.100,00	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.961.758.100,00	Sesuai	1
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.091.775.480,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.091.775.480,00	Sesuai	1
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	74.120.000,00	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	74.120.000,00	Sesuai	1
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	142.270.600,00	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	142.270.600,00	Sesuai	1
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0,00	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0,00	Sesuai	1
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	552.693.800,00	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	551.193.800,00		

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	413.807.400,00	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	415.307.400,00		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	476.265.040,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	476.265.040,00	Sesuai	1
Program Pengembangan UMKM	972.628.750,00	Program Pengembangan UMKM	972.628.750,00	Sesuai	1
Penanaman Modal					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.494.138.550,00	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	4.494.138.550,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	298.309.600,00	Program Pengemb Iklim Penanaman Modal	298.309.600,00	Sesuai	1
Program Promosi Penanaman Modal	424.843.800,00	Program Promosi Penanaman Modal	424.843.800,00	Sesuai	1
Program Pelayanan Penanaman Modal	198.516.200,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	198.516.200,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	350.242.300,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	350.242.300,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70.295.400,00	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70.295.400,00	Sesuai	1
Kepemudaan dan Olah Raga					
Program Pengemb Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.024.368.000,00	Program Pengemb Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.133.039.000,00		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.003.611.550,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.005.552.250,00		
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	833.675.000,00	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	833.671.000,00		
Statistik					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	870.674.848,00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	870.424.016,00		
Persandian					
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	125.951.499,00	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	125.957.600,00		
Kebudayaan					
Program Pengembangan Kebudayaan	885.000.000,00	Program Pengembangan Kebudayaan	885.000.000,00	Sesuai	1

Program Pengembangan Kesenian Tradisional	751.000.000,00	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	751.000.000,00	Sesuai	1
Program Pembinaan Sejarah	0,00	Program Pembinaan Sejarah	0,00	Sesuai	1
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	25.000.000,00	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	25.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Permuseuman	805.000.000,00	Program Pengelolaan Permuseuman	805.000.000,00	Sesuai	1
Perpustakaan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.970.401.789,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.970.401.980,00	Sesuai	1
Program Pembinaan Perpustakaan	748.321.861,00	Program Pembinaan Perpustakaan	748.322.520,00		
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	6.791.650,00	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	6.790.800,00		
Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip	239.920.000,00	Program Pengelolaan Arsip	239.920.000,00	Sesuai	1
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	5.080.000,00	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	5.080.000,00	Sesuai	1
Program Perizinan Penggunaan Arsip	0,00	Program Perizinan Penggunaan Arsip	0,00	Sesuai	1
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Kelautan dan Perikanan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.802.752.260,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.802.752.260,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	773.518.000,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.073518.000,00		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	574.904.600,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	574.904.600,00	Sesuai	1
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	3.999.800,00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	3.999.800,00	Sesuai	1
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	453.435.400,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	453.435.400,00	Sesuai	1

		Perikanan			
Pariwisata					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.313.951.030,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.313.951.030,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.608.543.000,00	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.608.543.000,00	Sesuai	1
Program Pemasaran Pariwisata	1.090.312.000,00	Program Pemasaran Pariwisata	1.090.312.000,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	55.000.000,00	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	55.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.190.000.000,00	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.190.000.000,00	Sesuai	1
Pertanian					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.951.822.315,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.960.912.315,00		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.004.182.435,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.339.296.435,00		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	23.318.532.900,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	24.468.532.900,00		
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	434.076.050,00	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	434.076.050,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	520.000.000,00	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	520.000.000,00	Sesuai	1
Program Penyuluhan Pertanian	8.246.886.100,00	Program Penyuluhan Pertanian	9.482.682.100,00		
Program Perizinan Usaha pertanian	4.830.000,00	Program Perizinan Usaha pertanian	4.830.000,00	Sesuai	1
Perdagangan					

Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.880.000,00	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.880.000,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.590.952.997,00	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.924.952.997,00		
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	210.527.000,00	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	212.127.000,00		
Program Pengembangan Ekspor	484.040.000,00	Program Pengemb Ekspor	419.197.400,00		
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	185.855.650,00	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	180.795.650,00		
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	13.625.000,00	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	13.625.000,00	Sesuai	1
Perindustrian					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.185.622.543,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.212.925.143,00		
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.729.267.900,00	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.276.267.900,00		
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	20.000.000,00	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	20.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	80.000.000,00	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	80.000.000,00	Sesuai	1
Transmigrasi		**Transmigrasi**			
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	135.300.000,00	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	135.300.000,00	Sesuai	1
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Sekretariat Daerah					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.680.677.200,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.624.253.671,00		
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8.892.904.000,00	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.326.504.000,00		
Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.627.011.000,00	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.627.011.000,00	Sesuai	1
Sekretariat DPRD					

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.245.968.062,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.313.016.680,00		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	48.632.788.551,00	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.165.785.400,00		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Perencanaan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.887.434.136,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.774.685.340,00		
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.090.207.750,00	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.694.484.700,00		
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.340.640.880,00	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.399.977.160,00		
Keuangan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.238.792.909,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.765.371.689,00		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	389.789.229.872,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	401.603.487.261,00		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.147.323.300,00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.602.012.500,00		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.137.924.875,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.398.307.778,00		
Kepegawaian					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.794.311.703,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.084.573.601,00		
Program Kepegawaian Daerah	2.925.394.700,00	Program Kepegawaian Daerah	2.381.519.719,00		
Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.411.561.560,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.901.178.750,00		
Penelitian dan					

Pengembangan					
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.192.298.000,00	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.412.700.000,00		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
Inspektorat					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.559.011.254,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.853.600.975,00		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.873.504.500,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.620.895.000,00		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.574.639.000,00	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.543.967.365,00		
UNSUR KEWILAYAHAN					
Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.778.425.967,64	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64.067.500.363,00		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	258.519.400,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	265.851.254,00		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	21.958.012.789,36	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.120.278.100,00		
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	507.723.500,00	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	299.480.917,00		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	590.716.800,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	740.116.953,00		
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.156.210.100,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	548.709.750,00		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
Kesatuan Bangsa dan Politik					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.306.008.218,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.154.992.370,00		

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	329.592.550,00	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.345.132.750,00		
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.372.155.500,00	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budpol	35.809.011.200,00		
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.285.637.512,00	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.214.470.000,00		
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	234.327.500,00	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	260.467.000,00		
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	199.212.500,00	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	782.702.000,00		
TOTAL SKOR/ NILAI					**63**

Jumlah Sesuai : 63

Jumlah Tidak Sesuai : 105

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program

= 73 / 168

= 0,37

Maka perhitungan Skor Dimensi 1 IPKD adalah;

Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

= Skor Rerata x Bobot

= ((1 + 1+ 1 + 0,28 + 0,37) / 5) x 20

= (3,65 / 5) x 20

= 0,73 x 20

= 14,6000

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja Dimensi 1 sebesar: 14,6000

2. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam IPKD, dimana indicator-indikator yang terdapat dalam dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan beberapa amanat peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain:

a. Alokasi jumlah belanja untuk urusan pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SEKRETARIAT DAERAH

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2023 KABUPATEN BLITAR

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	
1	a. **Urusan Bidang Pendidikan :**		814.885.634.407,00
	1 Belanja Operasi		
	a Belanja pegawai	621.869.751.423,00	
	b Belanja barang dan jasa	102.223.133.938,00	
	c Belanja hibah	43.993.160.000,00	
	d Belanja bantuan sosial	3.757.750.000,00	
	2 Belanja Modal	43.041.839.046,00	
	b. **Urusan Bidang Kebudayaan**		14.723.206.030,00
	1 Belanja Operasi		
	a Belanja pegawai	4.715.651.030,00	
	b Belanja barang dan jasa	8.917.089.100,00	
	c Belanja hibah	711.000.000,00	
	d Belanja bantuan sosial	0,00	
	2 Belanja Modal	379.465.900,00	
	c. **Urusan Bidang Perpustakaan**		3.970.515.300,00
	1 Belanja Operasi		
	a Belanja pegawai	2.286.101.300,00	
	b Belanja barang dan jasa	1.607.666.060,00	
	c Belanja hibah	0,00	
	d Belanja bantuan sosial	0,00	
	2 Belanja Modal	76.747.940,00	
	d. **Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**		7.981.105.000,00
	1 Belanja Operasi		
	a Belanja pegawai	42.630.000,00	
	b Belanja barang dan jasa	3.411.146.600,00	
	c Belanja hibah	4.281.600.000,00	
	d Belanja bantuan sosial	0,00	
	2 Belanja Modal	245.728.400,00	
	e. **Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain :**		0,00
	1 Belanja Transfer		
	Belanja bantuan keuangan	0,00	
	2 Sub keg.....pada SKPD....dst	0,00	
2	**Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Jumlah (a+b)**		**841.560.460.737,00**
3	**Total Belanja Daerah**		**2.776.441.929.813,93**
4	**Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah**		
	(Butir 2 : Butir 3) X 100%		**30,31%**

b. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD (di luar gaji)

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SEKRETARIAT DAERAH

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA KESEHATAN
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2023
KABUPATEN BLITAR

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	
1	a. **Urausan Bidang Kesehatan :**		**553.405.451.162,00**
	1 Belanja Operasi		
	a Belanja pegawai	97.239.960.030,00	
	b Belanja barang dan jasa	357.602.065.886,00	
	c Belanja hibah	300.000.000,00	
	d Belanja bantuan sosial	0,00	
	2 Belanja Modal	98.263.425.246,00	
	b. **Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan Bidang Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain :**		**0,00**
	1 Belanja Transfer		
	Belanja bantuan keuangan	0,00	
	2 Sub Kegiatan.....pada SKPD.....dst	0,00	
2	**Anggaran Kesehatan (a+b)**		**553.405.451.162,00**
3	**Total Belanja Daerah**		**2.776.441.929.813,93**
4	**Gaji ASN**		**649.082.559.223,00**
5	**Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)**		**2.127.359.370.590,93**
4	**Rasio Anggaran Kesehatan**		
	(2 : 5) X 100%		**26,01%**

c. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SEKRETARIAT DAERAH

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA INFRASTRUKTUR
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2023
KABUPATEN BLITAR

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	
1	**Total Belanja Daerah**		2.776.441.929.814,00
2	**Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa :**		
	a Belanja bagi hasil	18.035.126.161,00	
	b Bantuan keuangan	378.809.764.000,00	
	Jumlah (a+b)		396.844.890.161,00
3	**Selisih (1-2)**		**2.379.597.039.653,00**
4	**Minimal Belanja Insfrastruktur Pelayanan Publik (40% x selisih)**		**951.838.815.861,20**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	
1	a Belanja Modal		460.532.523.333,00
	1 Tanah	6.289.561.350,00	
	2 Peralatan dan mesin	83.094.580.747,00	
	3 Bangunan dan gedung	82.683.441.172,00	
	4 Jalan, irigasi dan jaringan	285.644.374.064,00	
	5 Aset tetap lainnya	1.920.566.000,00	
	6 Aset lainnya	900.000.000,00	
	b Belanja Pemeliharaan		19.804.308.684,00
2	a Belanja Hibah	68.343.404.000,00	
	b Belanja Bantuan Sosial	23.593.915.742,00	
	c Belanja Bantuan Keuangan	378.809.764.000,00	470.747.083.742,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		**951.083.915.759,00**

Selanjutnya rekapitulasi Skor Dimensi pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	PRASYARAT	SKOR
Alokasi jumlah belanja untuk urusan pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD (di luar gaji)	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
TOTAL SKOR		4
SKOR RERATA		1

Maka perhitungan Skor Dimensi 2 IPKD adalah;

Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

= Skor Rerata x Bobot

= 1 x 20

= 20,0000

3. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator ketepatan waktu dan keteraksesan terhadap dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diakses melalui website https://transparansi.blitarkab.go.id/ sebagai berikut:

No	INDIKATOR	INDIKATOR							JUMLAH
		KETEPATAN WAKTU						KETERAKSESAN	
		TGL PENETAPAN	TGL UNGGAH	RW/ RENTANG WAKTU (HARI)	BAU/ BATAS AKHIR UNGGAH (HARI)	S/ TS (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	NILAI		
		1	2	3 = 2 - 1	4	5	6	7	
1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD			30	30	TS	0	1	1
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran			30	30	TS	0	1	1
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Platfon Anggaran			30	30	TS	0	1	1

4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA-SKPD			30	30	TS	0	1	1
5	Informasi Ringkasan Dokumen RKA-PPKD			30	30	TS	0	1	1
6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perda tentang APBD			30	30	TS	0	1	1
7	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD			30	30	TS	0	1	1
8	Informasi Perkada tentang Penjabaran APBD			30	30	TS	0	1	1
9	Informasi Ringkasan DPA SKPD			30	30	TS	0	1	1
10	Informasi DPA SKPD			30	30	TS	0	1	1
11	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah			30	30	TS	0	1	1
12	Informasi Realisasi Belanja Daerah			30	30	TS	0	1	1
13	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah			30	30	TS	0	1	1
14	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD			>30	30	TS	0	1	1
15	Informasi Perda tentang Perub APBD			>30	30	TS	0	1	1
16	Informasi Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD			>30	30	TS	0	1	1
17	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD			>30	30	TS	0	1	1
18	Informasi Rencana Umum Pengadaan			30	30	TS	0	1	1
19	Informasi SK Kepala Daerah tentang PPKD			30	30	TS	0	1	1
20	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi			30	30	TS	0	1	1
21	Informasi Laporan Arus Kas			30	30	TS	0	1	1
22	Informasi LRA Seluruh SKPD			30	30	TS	0	1	1
23	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD			30	30	TS	0	1	1

24	Informasi Neraca			30	30	TS	0	1	1
25	Informasi CaLK Pemda			30	30	TS	0	1	1
26	Informasi Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah			30	30	TS	0	1	1
27	Informasi LKjIP Tahunan Pemda			30	30	TS	0	1	1
28	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			30	30	TS	0	1	1
29	Informasi Opini BPK			30	30	TS	0	1	1
						TOTAL	**0**	**29**	**29**
						RATA-RATA	**0**	**1,00**	**1,00**

Maka perhitungan Skor Dimensi 3 IPKD adalah

Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

= Skor Rerata x Bobot

= 1 x 7,5

= 7.5

4. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

Penentuan skor masing-masing indicator untuk dimensi penyerapan anggaran adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau di atas 80% (lebih dari 80%) maka mendapatkan Skor 1. Sebaliknya, persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80%, maka skor diberi angka 0.

INDIKATOR PENYERAPAN	ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN ANGGARAN	SKOR
Anggaran Belanja Pegawai	939.040.227.655,00	876.823.965.004,50	93,37%	1
Anggaran Belanja Bunga	0	0	0,00%	0
Anggaran Belanja Subsidi	0	0	0,00%	0
Anggaran Belanja Hibah	101.052.565.200,00	100.535.250.416,00	99,49%	1
Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	396.844.890.161,00	396.646.276.447,00	99,95%	1
Anggaran Belanja Tidak Terduga	2.273.000.000,00	1.593.963.580,00	70,13%	0

Anggaran Barang dan Jasa	815.777.649.981,59	729.518.255.398,47	89,43%	1
Anggaran Belanja Modal	430.177.461.092,68	385.119.247.079,61	89,53%	1
TOTAL SKOR				**5**
RERATA SKOR				**0,55**

Maka perhitungan Skor Dimensi 4 IPKD adalah;

Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

= Skor Rerata x Bobot

= 0,55 x 20

= 11,0000

5. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah

Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dinilai dari indikator-indikator sebagai berikut:

a. Kemandirian Keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.
b. Fleksibilitas Keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*).
c. Solvabilitas Operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.
d. Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.
e. Solvabilitas Jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.
f. Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

Maka, data pendukung perhitungan nilai Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah digunakan data keuangan Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

INDIKATOR DIMENSI 5	DATA TAHUN 2022
Total PAD	422.738.491.399,68
Total Pendapatan	2.445.113.221.433,68
Dana Alokasi Khusus (DAK)	393.838.174.008,00
Total Kewajiban	39.605.469.690,42
Belanja Pegawai	879.899.799.906,80
Total Pendapatan LO	2.226.888.469.102,35
Total Pendapatan DAK LO	393.838.174.008,00
Total Beban LO	2.213.488.309.324,63
Kas dan Setara Kas	288.013.504.778,93
Investasi Jangka Pendek	0,00
Kewajiban Lancar	39.605.469.690,42
Total Aset Tetap	4.274.593.416.152,33
Kewajiban Jangka Panjang	0,00
Jumlah Penduduk	1.223.745

Selanjutnya, dilaksanakan pengukuran dengan formulasi sebagai berikut:

Kemandirian Keuangan

= (Total PAD / Total Pendapatan)

Fleksibilitas Keuangan

= (Total Pendapatan – DAK) / (Total Kewajiban + Belanja Pegawai)

Solvabilitas Operasional

= (Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO) / Total Beban LO

Solvabilitas Jangka Pendek

= (Kas dan Setara Kas + Investasi Jangka Pendek) / Kewajiban Lancar

Solvabilitas Jangka Panjang

= Total Aset Tetap / Kewajiban Jangka Panjang

Solvabilitas Layanan

= Total Aset Tetap / Jumlah Penduduk

Berdasarkan Hasil Penghitungan Dimensi 5 pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2022, yang telah dilaksanakan oleh Kemendagri, maka Kabupaten Blitar masuk dalam Kategori Kemampuan Keuangan Daerah "Rendah" dengan Rasio KFD (Kapasitas Fiskal Daerah) sebesar 1,313. Hal tersebut ditetapkan dalam Permenkeu Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Dengan ketentuan di atas, maka Hasil Pengukuran Dimensi 5 IPKD Tahun 2022 didapatkan bahwa Nilai Dimensi 5 Tahun 2022 sebesar 2,977 (terlampir) sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
80.	KEPULAUAN ANAMBAS	9,192	20	10,603	15	3,591	15	73,387	Perlu Perbaikan	B
81.	CIREBON	13,049	20	7,5	15	2,737	15	73,286	Perlu Perbaikan	B
82.	TULANG BAWANG BARAT	9,548	19,655	12,414	15	1,621	15	73,237	Perlu Perbaikan	B
83.	SOLOK	7,707	19,828	13,707	15	1,87	15	73,112	Perlu Perbaikan	B
84.	TRENGGALEK	12,4	20	8,276	15	2,357	15	73,033	Perlu Perbaikan	B
85.	TAPANULI TENGAH	10,751	15	15	15	1,939	15	72,691	Perlu Perbaikan	B
86.	PEKALONGAN	14,419	19,138	11,379	15	2,559	10,005	72,501	Perlu Perbaikan	B
87.	REMBANG	10,804	19,655	14,483	10	2,538	15	72,48	Perlu Perbaikan	B
88.	PADANG PARIAMAN	11,965	19,31	14,483	10	1,68	15	72,438	Perlu Perbaikan	B
89.	DAIRI	8,973	14,655	11,638	20	2,166	15	72,432	Perlu Perbaikan	B
90.	SUKOHARJO	11,911	20	11,638	10	3,748	15	72,297	Perlu Perbaikan	B
91.	BANTUL	9,38	15	14,741	15	3,071	15	72,193	Perlu Perbaikan	B
92.	TULUNGAGUNG	10,367	19,655	14,224	10	2,813	15	72,059	Perlu Perbaikan	B
93.	KLATEN	9,192	20	15	10	2,803	15	71,995	Perlu Perbaikan	B
94.	BARRU	11,734	20	13,19	10	1,775	15	71,699	Perlu Perbaikan	B
95.	GOWA	14,471	15	15	15	2,006	10,005	71,482	Perlu Perbaikan	B
96.	BLITAR	8,398	20	10,086	15	2,977	15	71,461	Perlu Perbaikan	B
97.	KAMPAR	8,871	19,828	9,828	15	2,563	15	71,089	Perlu Perbaikan	B
98.	PONOROGO	9,842	19,828	14,224	10	2,137	15	71,031	Perlu Perbaikan	B
99.	PASAMAN BARAT	9,622	19,828	14,224	10	2,237	15	70,911	Perlu Perbaikan	B
100	SIAK	8,811	19,483	9,569	15	2,986	15	70,848	Perlu Perbaikan	B
101.	HUMBANG HASUNDUTAN	11,72	19,31	7,5	15	2,272	15	70,803	Perlu Perbaikan	B
102.	BANGLI	11,505	14,138	12,931	15	2,154	15	70,728	Perlu Perbaikan	B

6. Perhitungan Skor/ Nilai Opini BPK

Pemberian opini atas LKPD oleh BPK RI sesuai dengan amanat perundang-undangan. Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan pada tingkat kesesuaian implementasi pengelolaan keuangan daerah pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ketaatan pada peraturan perundang-undangan, kecukupan bukti, dan system pengendalian internal pemerintah.

Berdasarkan hasil opini BPK RI atas LKPD, maka dalam pengukuran skor Dimensi Opini BPK diperoleh dengan kriteria:

a. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut, maka diberikan Skor 1;
b. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 2 tahun terakhir secara berturut-turut, maka diberikan Skor 2/3 (0,667);
c. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 1 tahun terakhir, maka diberikan Skor 1/3 (0,334);
d. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini *Disclaimer*, maka diberikan Skor 0.

Pemerintah Kabupaten Blitar dalam 3 tahun terakhir (Tahun 2021-2023) secara berturut-turut telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka mendapatkan Skor 1.

Bobot Dimensi 6 IPKD (Opini BPK) sebesar 15, sehingga formulasi perhitungan Skor adalah sebagai berikut:

Indeks Dimensi Opini BPK:

= Skor x Bobot

= 1 x 15

= 15

Dengan melaksanakan perhitungan IPKD di atas, maka total skor IPKD Kabupaten Blitar Tahun 2023 dapat diformulasikan sebagai berikut:

= Dimensi 1 + Dimensi 2 + Dimensi 3 + Dimensi 4 + Dimensi 5 + Dimensi 6

= 14,6 + 20 + 7,5 + 11 + 2,9 + 15

=71

Capaian Kinerja IKU 2 = (Realisasi / Target) x 100%
= (71 / 70) x 100%
= **101,43 %**

Berikut informasi perbandingan realisasi dan capaian kinerja IPKD tahun 2023 dengan tahun - tahun sebelumnya:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dimensi 1	9,9793	10,1118	5,2882	11,7418	8,3980	14,600
Dimensi 2	10,0000	20,0000	10,0000	19,1379	20,0000	20,000
Dimensi 3	9,8276	8,2759	8,0172	11,1207	10,0860	7,500
Dimensi 4	10,0000	15,0000	20,0000	15,0000	15,0000	11,0000
Dimensi 5	1,1196	1,1837	1,3139	3,1481	2,9770	2,000
Dimensi 6	0,0000	5,0100	10,0050	15,0000	15,0000	15,000
TOTAL	**40,9265**	**59,5813**	**54,6243**	**75,1485**	**71,4610**	**71,000**
Std. Deviasi	21,2367	19,4159	18,2637	12,3803	8,84	
Rerata	46,5764	50,9884	55,2812	65,5288	69,54	
Predikat	**B/ Perlu Perbaikan**	**B/ Perlu Perbaikan**	**B/ Perlu Perbaikan**	**B/ Perlu Perbaikan**	**B/ Perlu Perbaikan**	**B/ Perlu Perbaikan**

Pencapaian Nilai IPKD Kabupaten Blitar pada Tahun 2018 s.d. tahun 2023 berfluktuasi dengan interval antara 40,9265 (2018) sampai dengan 75,1485 (2021). Capaian signifikan ini didukung oleh efektivitas lintas bidang (crosscutting) antar perangkat daerah, antara lain: Bappedalitbang, BPKAD, Diskominfo, Bag. ULP, Dispendukcapil, dan Inspektorat. Kerja sama tersebut berkaitan erat dengan kecukupan data pendukung pada saat input data IPKD ke dalam aplikasi IPKD Kemendagri yang dilaksanakan secara serentak nasional.

Dimensi 1: pada tahun 2023 mencapai nilai tertinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan meningkatnya tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran;

Dimensi 2: pada tahun 2023 mencapai nilai maksimal bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan telah terpenuhinya penganggaran SPM sesuai dengan ketentuannya;

Dimensi 3: pada tahun 2023 menurun dikarenakan tingkat ketepatan waktu upload yang mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi tingkat aksesabilitas masyarakat terhadap informasi dokumen keuangan daerah;

Dimensi 4: pada tahun 2023 menurun dikarenakan realisasi anggaran dana darurat tidak mencapai 80%, maka perlu adanya strategi untuk memaksimalkan pencairan dana darurat untuk belanja selain penanganan kebencanaan daerah;

Dimensi 5: nilai perolehan pada dimensi ini relatif rendah bila dibandingkan dengan nilai dimensi lainnya, dikarenakan rendahnya pertumbuhan PAD sehingga mengakibatkan rendahnya kemandirian daerah yang berdampak pada penilaian lainnya.

Dimensi 6: pada tahun 2023, dapat memperoleh nilai maksimal karena telah mendapatkan predikat WTP selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya adalah perlu upaya untuk penguatan tim kerja ke depan melalui:

1. Pembentukan Tim IPKD kabupaten Blitar dengan SK Kepala Daerah;
2. Penyusunan SOP terkait masa persiapan, masa input data, dan masa evaluasi hasil input data;
3. Perlunya sosialisasi hasil pengukuran IPKD kepada para pemangku kepentingan dan para pemangku kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IPKD, yang secara langsung berkaitan dengan upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah;
4. Perlunya pembahasan dimensi-dimensi yang belum tercapai dalam rapat penyusunan anggaran daerah.

Seperti dijelaskan pada Bab II sebelumnya, bahwa capaian IPKD ini didukung oleh Capaian Sasaran Strategis 2 didukung oleh program/ kegiatan/ sub kegiatan pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian sebagai berikut:

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	***Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD***	**100%**	**100%**
	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	**92%**	**92,63%**
	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	**84%**	**99,74 %**
	Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	**100%**	**100%**
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan*	100%	100%
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun*	2	2
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	2	2
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	52	52
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	52	52
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	*Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi*	52	52
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Derah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD*	2	2
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	*Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan*	2	2

Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD*		
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dok Regulasi serta Kebijakan Bid. Anggaran*	1	1
Sub.Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	*Jumlah Dok Hasil Koord Perencanaan Anggaran Pendapatan*	1	1
Sub.Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	*Jumlah Dok Hasil Koord Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	1	1
Sub.Keg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	*Jumlah Dok Hasil Koord Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	1	1
Sub.Keg. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemkab/ Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab/Kota*	52	52
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase Tk Penyerapan Anggaran PD sesuai Rencana*	95%	95%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	15.200	15.200
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	12	12
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi Sinkronisasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	12	12

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dan Laporan Arus Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Lap Real Penerimaan dan Pengeluaran Kasda, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) & Lap Hasil Koordinasi dlm rangka Peny Lap Real Penerimaan & Pengeluaran Kasda, Lap Aliran Kas, & PelaksanaanPemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	12	12
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dok Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	120	120
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu yg Berkait an dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan*	1	1
Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pemerintah Kabupaten/ Kota*	52	52
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan*	100%	100%
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah	*Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*	78	78
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	*Jumlah Dok Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	208	208

Pendapatan LO dan Beban			
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	78	78
Koordinasi dan Penysusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	*Jumlah Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2	2
Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	*Jumlah Dok Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD*	1	1
Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jml Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah*	1	1
Penyusunan Kebijakan dan Paduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebj dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemda*	2	2
Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/ Kota*	78	78
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota -	*Jumlah BLUD Kab/Kota yang Dibina*	26	26

Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Realisasi Dana BK, Bagi Hasil, dan Dana Darurat*	100%	99,77%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jml Lap Hasil Analisis Perencanaan & Penyaluran BK*	1	1
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	1	1
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	*Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota*	1	1

SASARAN STRATEGIS 3	:	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
INDIKATOR	:	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah
TARGET	:	86 %
REALISASI	:	97,80%
CAPAIAN	:	113,72%

Pengukuran Sasaran Strategis 3 dilaksanakan dengan mengukur Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah dengan data sebagai berikut:

Aset	Nilai Aset Tetap Neraca BMD	Nilai Aset Tetap dalam Neraca LKPD
Tanah	908.835.330.229,02	908.675.310.222,02
Peralatan dan Mesin	910.403.669.485,19	1.038.322.024.465,72
Gedung dan Bangunan	1.459.382.548.440,72	1.452.373.143.974,25
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.823.918.600.883,53	3.823.900.125.683,53
Aset Tetap Lainnya	11.710.767.462,35	51.685.675.411,71
Konstruksi Dalam Pengerjaan	47.806.768.091,51	47.725.786.091,51
JUMLAH ASET TETAP	**7.162.057.684.592,32**	**7.322.682.065.848,64**

Formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

= (Nilai Aset Tetap Neraca BMD : Nilai Aset Tetap Neraca Keuda) x 100%

= (Rp. 7.162.057.684.592,32 : Rp 7.322.682.065.848,64) x 100%

= 97,80%

Maka, capaian IKU 3 BPKAD Kab. Blitar Tahun 2023 sebagai berikut:

= (Capaian : Target) x 100%

= (97,80 : 86) x 100%

=113,72%

Analisa Capaian:

Berikut disajikan tabel perbandingan target, realisasi, capaian pada tahun 2021 s.d. 2023.

	2021	2022	2023
Target	84%	85 %	86%
Realisasi	91.92%	96,96%	97,80%
Capaian	109,43%	115,82%	113,72%

Dari tabel di atas peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah yang diukur dengan tingkat kesesuaian antara nilai BMD pada Neraca Aset dengan Nilai BMD pada Neraca Keuangan, mengalami peningkatan. Secara berturut-turut, realisasinya meningkat dari 91,92% (2021) menjadi 96,96% (2022) hingga 97,80% (2023). Demikian juga capaiannya meningkat dari 109,43 menjadi 113,72 pada tahun 2023. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah tingkat konsistensi pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan. Proses penilaian kembali atas BMD menjadi fundamen dalam menyajikan nilai Aset secara akuntabel. Selain itu proses inventarisasi dan penghapusan aset juga membantu pemda dalam menyesuaikan nilai aset secara existing. Sebagai langkah preventif, maka yang dilakukan adalah menyusun standar harga dan standar kebutuhan BMD untuk mencegah tingkat kesalahan maupun penyimpangan pengelolaan BMD. Penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya adalah penguatan fungsi perencanaan dan penatausahaan BMD agar pemanfaatan BMD dapat memberikan kontribusi pada peningkatan PAD.

Capaian tersebut didukung oleh Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang diampu Bidang Pengelolaan Aset Daerah, antara lain:

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	*Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar*	90%	90%
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase PD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai Peraturan UU*	90%	94,23%
Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	2	2
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD*	2	2

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan BMD*	52	52
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD*	1	1
Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Lap Penatausahaan BMD*	1	1
Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Lap Hasil Pengamanan BMD*	3	3
Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Lap Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD*	2	1
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jml Dok Hasil Optim. Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD*	4	4
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	*Jumlah Lap Hasil Rekon dalam rangka Peny Lap BMD*	52	52
Penyusunan Laporan BMD	*Jumlah Lap BMD yang Disusun*	5	5

Perbandingan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perda Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Selanjutnya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah unsur penunjang bidang keuangan, dengan mempertimbangkan perkembangan isu-isu strategis terkini, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI INDIKATOR	
				2022	2023
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	79/ BB	84,62/ A	80,63/A
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	70	71,461	71
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	86%	96,96%	97,80%

Analisa:

Bila dibandingkan dengan tahun 2022, Realisasi Indikator tahun 2023 dalam kondisi stabil. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai predikat SAKIP (hasil penilaian mandiri) mendapatkan predikat A. Realisasi Indikator IPKD Tahun 2022 dan 2023 dalam kondisi tetap pada poin 71. Terdapat peningkatan pada Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah dari 96,96% (2022) menjadi 97,80% (2023). Hal tersebut dikarenakan, perangkat daerah semakin tertib dalam mengelola BMD terkait dengan perencanaan RKBMD maupun RKPBMD, pemanfaatan aset, pencatatan aset, penilaian aset, dan pengamanan aset, serta penghapusan aset secara berkala. Dengan adanya langkah konkret tersebut, proses pencatatan aset dapat disajikan sesuai dengan ketentuan. Penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya adalah dengan melakukan penguatan anggaran dan penguatan SDM. Hal tersebut dikarenakan proses penyelesaian permasalahan aset memiliki tingkat kompleksitas yang relatif tinggi.

BPKAD Kabupaten Blitar merupakan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang bidang keuangan, berperan serta dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 khususnya pada Misi Ke-3: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas, dengan Tujuan: Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, dan Sasaran: Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Blitar 2021-2026 pada BPKAD Kabupaten Blitar tidak terlepas dari faktor internal (realitas yang berkembang di dalam lembaga) maupun faktor eksternal (realitas yang berkembang di luar lembaga). Keberhasilan pelaksanaan visi dan misi di atas dapat tercapai dengan efektif dan efisien, jika lembaga tersebut mengetahui potensi yang ada, melalui metode Analisis SWOT, yang dijabarkan sebagai berikut:

ANALISIS SWOT

Kekuatan (Strenght)

1. Memiliki Tupoksi yang cukup strategis;
2. Tersedianya SDM Aparatur;
3. Koordinasi yang baik antar bidang;
4. Kinerja SDM yang cukup baik

Kelemahan (Weakness)

1. Keterbatasan Penganggaran;
2. Validasi data aset daerah yang belum optimal;
3. Belum optimalnya pendampingan PD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

Peluang (Opportunity)

1. Koordinasi yang baik antar PD dan pihak terkait
2. Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang semakin pesat;
3. Perencanaan anggaran berbasis kinerja;
4. Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang pasti

Ancaman (Treatment)

1. Kondisi kapasitas fiskal daerah yang menurun
2. Pandemi COVID-19 yang tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya
3. Perubahan kondisi perekonomian nasional/ regional yang berubah dengan cepat, berdampak pada perubahan regulasi

Berdasarkan analisa SWOT di atas, maka kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) merupakan faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sebaliknya, kelemahan (weakness) dan hambatan (threaths) merupakan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka memformulasikan strategi dan kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar dalam rangka memenuhi target kinerja 5 (lima) tahun ke depan, antara lain:

Pada Proses analisis SWOT, strategi dapat diformulasi dengan menginteraksikan keempat aspek tersebut. Pertama adalah strategi S-O, strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, perangkat daerah memiliki peluang dan kekuatan di saat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar- besarnya atau biasa disebut Comparative Advantage. Strategi yang harus diterapkan adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy). Strategi ini memberikan penekanan pada metode perangkat daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada.

Strategi S-O
1. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dinamis, responsif, dan transformatif 2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah; 3. Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah. 4. Peningkatan dukungan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Blitar untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada perangkat daerah didorong untuk menggeser ancaman menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki.

Strategi S-T
1. Peningkatan kualitas perencanaan dan inventarisasi aset daerah; 2. Peningkatan kualitas pencatatan dan penghapusan aset daerah; dan 3. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan penjagaan aset daerah.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. BPKAD Kabupaten Blitar menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak harus menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat *investment* dan yang bersifat *divesment*. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Blitar bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa *competitive* atau memiliki daya saing.

Strategi W-O
1. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian APBD; 2. Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban APBD;

Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Strategi W-T
1. Optimalisasi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD di saat pandemi COVID-19 dan ruang fiskal pemerintah daerah yang menurun

Dalam analisis lingkungan di atas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *demage control*, yang diartikan sebagai

upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Melalui proses Analisis SWOT yang telah dilakukan, setidaknya teridentifikasi alternatif strategi BPKAD Kabupaten Blitar pada periode Renstra Tahun 2021-2026. Seluruh alternatif strategi kemudian dimatangkan melalui FGD (*Forum Group Discussion*). Pada akhirnya BPKAD Kabupaten Blitar kemudian bersepakat menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dinamis, responsif, dan transformatif;
2. Optimalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
3. Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah;
4. Peningkatan kualitas perencanaan keuangan daerah melalui optimalisasi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD di saat pandemi COVID-19 dan ruang fiskal pemerintah daerah yang menurun;
5. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian APBD;
6. Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban APBD;
7. Peningkatan dukungan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
8. Peningkatan kualitas perencanaan dan inventarisasi aset daerah;
9. Peningkatan kualitas pencatatan dan penghapusan aset daerah; dan
10. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan penjagaan aset daerah.

Arah Kebijakan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan kinerja yang memberikan arahan dan panduan kepada BPKAD Kabupaten Blitar agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar juga merupakan pedoman untuk menentukan kinerja selama lima tahun guna mencapai sasaran Renstra dan RPJMD secara bertahap. Penyusunan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan.

Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu

strategis pada pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi keadaan keuangan dan aset daerah maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang kondisi keuangan daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan kinerja tahunan pada BPKAD Kabupaten Blitar juga memerhatikan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD. Hal tersebut memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang *inherent* tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA , *BALDATUN, TOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUR*				
MISI 3: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas				
Tujuan: Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas				
Sasaran: Meningkatnya Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
1	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dinamis, responsif, dan transformative	Optimalisasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional
				Optimalisasi manajemen kepegawaian
			Optimalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan Kapasitas ASN BPKAD dalam implementasi SAKIP dan RB
				Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja PD

			Optimalisasi akuntabilitas pengelolaan keuangan PD	Peningkatan kualitas verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan PD
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan keuangan daerah	Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keuangan daerah
				Peningkatan kualitas kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
				Penguatan koordinasi secara berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan
				Sinkronisasi antara perencanaan pemb. daerah dan penganggaran keuangan daerah serta pengalokasian anggaran belanja
				Optimalisasi Mekanisme Penyusunan RAPBD/ RAPBD-P dan Penetapan APBD/ APBD-P
			Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian APBD	Optimalisasi Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
				Pengendalian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta dana transfer secara optimal
				Penyerapan anggaran yang tepat waktu
			Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban APBD	Optimalisasi penyusunan Laporan Realisasi APBD dan Perubahan APBD
				Optimalisasi pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan SAP
				Optimalisasi penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
				Optimalisasi penyelesaian kerugian daerah
				Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
				Transparansi dan ketepatan waktu dalam penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah
				Optimalisasi kondisi keuangan daerah
			Peningkatan dukungan pengelolaan keuangan daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Optimalisasi penyelenggaraan informasi keuangan daerah

				Peningkatan IT serta sarana dan prasarana yang memadahi
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan inventarisasi aset daerah	Peningkatan kapasitas SDM pengelola aset daerah
				Peningkatan kualitas kebijakan teknis pengelolaan aset daerah
				Peningkatan perencanaan dan pengendalian aset serta pemanfaatan inventarisasi aset
			Peningkatan kualitas pencatatan dan penghapusan aset daerah	Pemuktahiran dan Optimalisasi penghapusan aset
			Peningkatan kualitas pemanfaatan dan penjagaan aset daerah	Optimalisasi pemanfaatan aset dan peningkatan penjagaan aset daerah
			Optimalisasi dukungan pengelolaan aset daerah berbasis penguatan dan pemuktahiran teknologi informasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Peningkatan IT serta sarana dan prasarana yang memadahi

Strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan diharapkan dapat menjadi penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan dan program prioritas antara perangkat daerah dan pemerintah daerah. Dengan maksud bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan perlu strategi yang tepat selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dan program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

B. Realisasi Anggaran

Salah satu harapan terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (good government) adalah terciptanya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal. BPKAD Kabupaten Blitar, menjadi unsur pendukung dari pemerintah daerah di bidang keuangan, berusaha merespons harapan tersebut, dengan terus meningkatkan kinerja kelembagaan dan kinerja keuangan daerah. Dimana kinerja keuangan daerah dapat dievaluasi melalui realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Efektivitas realisasi anggaran dapat dinilai dari tingkat ketepatan waktu penyerapan anggaran dan capaiannya pada akhir tahun, serta sisa lebih perhitungan anggaran. Perbandingan

anggaran pada BPKAD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

2022	2023
Rp. 406.043.305.781,00	415.691.095.762,00

Dari total pagu anggaran yang dikelola BPKAD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023, dialokasikan pada 3 program, 12 kegiatan, yang mendukung capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKU). Alokasi per sasaran pembangunan/ cost per outcome merupakan instrument untuk melihat perbandingan antara anggaran per sasaran strategis dengan total anggaran. Berikut disajikan Alokasi per Sasaran Pembangunan BPKAD Kabupaten Blitar per Tahun 2023:

Tabel 3.2.1
Alokasi per Sasaran Pembangunan
BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE ANGGARAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai dan Predikat SAKIP PD	12.466.726.101,00	3,18
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuda	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	401.603.487.261,00	96,43
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	1.620.882.400,00	0,39

Dari tabel di atas maka dapat didiskripsikan bahwa 96,43% dari total anggaran dialokasikan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaporan keuangan daerah, yang pada akhirnya mendukung capaian terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Alokasi anggaran sebesar 0,39% dari total anggaran dialokasikan untuk pengelolaan aset daerah. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar 3,18%. penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya meminimalisasi belanja pegawai, mengefektifkan belanja bidang pengelolaan keuangan dan penguatan belanja pengelolaan aset daerah, sesuai dengan isu-isu strategis yang berkembang.

Dalam rangka mengukur efisiensi kinerja dan anggaran, maka BPKAD Kabupaten Blitar melakukan pengukuran melalui perbandingan Tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai dan Predikat SAKIP PD	79/ BB	81,40/A	103,03 %	**12.466.726.101**	**11.681.017.936**	**93,70 %**
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuda	Indeks Dimensi Kesesuaian Dok. Perencanaan dan Penganggaran	70	71	101,43 %	**401.603.487.261**	**400.564.684.923**	**99,74 %**
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tk. Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	86%	97,80%	113,72 %	**1.620.882.400**	**1.584.559.944**	**97,76 %**

Realisasi anggaran tertinggi sebesar 99,74% terdapat pada dukungan capaian Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuda sebesar 101,43%. Realisasi anggaran terendah sebesar 93,70% terdapat pada dukungan capaian 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD. Dengan capaian kinerja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas realisasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja. Penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya adalah tetap menerapkan *money follow program*, dimana penguatan anggaran dalam pengelolaan aset perlu dioptimalkan guna mendukung proses sertifikasi jalan lingkungan, sebagaimana rekomendasi dari MCP KPK.

Selanjutnya tingkat efisiensi penggunaan sumber daya juga dapat diukur dan dianalisa dalam tabel 3.2.3 Sebagai berikut:

Tabel 3.2.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
BPKAD Kabupaten Blitar tahun 2023

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFISIENSI %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai dan Predikat SAKIP PD	103,03%	93,70%	9,33%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuda	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	101,43%	99,74%	1,69%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tk.Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	113,72%	97,76 %	15,96%

Analisa:

Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang paling efektif terdapat pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah dengan capaian kinerja 113,72% dan penyerapan anggaran 97,76%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 15,96%. Hal tersebut dikarenakan proses pengamanan aset berupa kegiatan sertifikasi tanah berjalan efektif.

Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang paling efektif terdapat pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan capaian kinerja 103,03% dan penyerapan anggaran 93,70%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 9,33%. Hal tersebut dikarenakan proses belanja barang dan jasa serta barang modal berjalan sesuai dengan ketentuan. Belanja pegawai dapat dikurangi terkait frekuensi dan kuantitas perjalanan dinas.

Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang paling efektif terdapat pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuda dengan capaian kinerja 101,43% dan penyerapan anggaran 99,74%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 1,63%. Tingkat efisiensi yang rendah dikarenakan proses pencairan/ realisasi dana transfer berjalan secara optimal sesuai ketentuan. Demikian juga penyerapan anggaran pada masing-masing bidang. Hal tersebut menunjukkan tingkat perencanaan dan penganggaran berjalan efektif.

Penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, adalah dengan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran strategis merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kelembagaan dalam meningkatkan *performance*-nya. Semakin besar tingkat efisiensinya maka *performance* suatu perangkat daerah akan semakin baik, demikian sebaliknya semakin rendah/ kecil tingkat efisiensinya, maka perangkat daerah tersebut perlu dievaluasi baik tata kerjanya maupun SDM nya. Tabel 3.2.3 di atas, mendiskripsikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya secara optimal telah tercapai pada masing-masing sasaran strategis.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Dalam rangka mendukung Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*), BPKAD Kabupaten Blitar sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan, berusaha meningkatkan kinerjanya, dengan melaksanakan perencanaan yang terukur. Selanjutnya BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara yang berkesinambungan, hingga pada akhirnya melaksanakan pengendalian/ evaluasi kinerja secara menyeluruh. Dalam menjalankan tupoksinya, BPKAD Kabupaten Blitar berupaya untuk memberikan nilai tambah/ nilai positif, yang dapat mendukung upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Blitar 2021-2026, BPKAD Kabupaten Blitar memiliki peran serta dalam mewujudkan misi ke-3, yaitu Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas. Hal tersebut bertujuan untuk menjawab isu strategis: (1) tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, (2) tuntutan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik, dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Dengan sasaran strategis Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas, serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Blitar sebagai upaya untuk menjawab isu- isu strategis tersebut, antara lain:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

   Secara umum pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut mengacu pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

   Secara umum pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

   Secara umum pengukuran IKU tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tahun 2023 BPKAD Kabupaten Blitar terus berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan proses bisnis perencanaan penganggaran, peningkatan pelayanan verifikasi pencairan anggaran yang tepat waktu, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Di bidang keuangan, BPKAD berupaya melakukan pengelolaan keuangan daerah berbasis TI/ aplikasi SIPD dan FMIS. Di bidang pengelolaan aset daerah, BPKAD Kabupaten Blitar terus berupaya untuk memenuhi Renaksi MCP KPK dan Tindak Lanjut Temuan BPK dengan melaksanakan pencatatan aset yang akuntabel, pemanfaatan aset yang efektif, dan pengamanan aset (sertifikasi tanah dan tanah di bawah jalan kabupaten), penilaian aset daerah yang telah dilaksanakan secara bertahap. Hal ini menunjukkan sinyal positif peningkatan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagaimana didiskripsikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2023.

Dalam tata kelola keuangan perangkat daerah, BPKAD Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran daerah, realisasi pendapatan, realisasi penyerapan anggaran, dan pertanggungjawaban-pelaporan keuangan daerah secara optimal, dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah sesuai dengan *framework* Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka perlu didukung oleh budaya kerja organisasi yang mendukung terlaksananya indikator kinerja utama perangkat daerah.

Maka BPKAD Kabupaten Blitar perlu berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi organisasi pembelajar (*learning organizational*) dengan memanfaatkan potensi yang ada, sebagai fudamen/ dasar yang kuat bagi keberhasilan kinerja BPKAD Kabupaten Blitar. LKjIP BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan diskripsi tentang capaian kinerja pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini juga sebagai perwujudan aspek transparansi dan akuntabilitas BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, untuk berperan serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Blitar.

B. Rencana Tindak Lanjut

Di masa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa tingkat kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik akan semakin meningkat. BPKAD Kabupaten Blitar berperan aktif melaksanakan tugas penunjang Pemerintah Kabupaten Blitar di bidang keuangan.

Dengan memperhatikan perihal di atas, maka rencana tindak lanjut BPKAD Kabupaten Blitar yang dapat dilaksanakan ke depan adalah:

1. Secara internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ diklat, seminar, *workshop*, *in house training*).
2. Secara kelembagaan, meningkatkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan skala prioritas pada program/ kegiatan/ sub kegiatan, dengan mengacu pada (1) Visi Misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; (2) Isu-isu strategis yang berkembang, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan (3) Implementasi Peraturan baru dan reviu implementasi perundang-undangan yang berlaku.
3. Secara eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan), BUMN (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Taspen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPKAD Prov. Jatim), dan perangkat daerah terkait di lingkup Kabupaten Blitar, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Blitar.
4. Tindak Lanjut atas Rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 Nomor: R/7cO/543/409.9.4/2023 tanggal 28 Juli 2023, antara lain:
   a. Melakukan reviu dan perbaikan antar dokumen perencanaan tingkat PD baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek, agar tujuan dan sasaran strategis setiap dokumen perencanaan beserta indikatomya dapat selaras sehingga pelaksanaan proses pengelolaan manajemen kinerja dapat berjalan dengan baik dan informasi yang dihasilkan dapat diandalkan;

b. Memformalkan peta proses bisnis sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
c. Melakukan reviu dan menyusun penjenjangan kineria dengan mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar;
d. Melakukan reviu atas dokumen IKU dan menyelaraskan dengan dokumen Renstra Perubahan;
e. Melaksanakan pengukuran kineria dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara betenjang mulai level terendah hingga tertinggi yang didasarkan pada rencana aksi yang telah disusun untuk dapat diketahui ketercapaian dan kendala yang dihadapi pada masing-masing jenjang;
f. Mendorong adanya pemanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dan sistematis dengan berfokus tidak hanya pada anggaran dan pelaksanaan kegiatan, namun juga pada kinerja, sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
g. Mendorong pemanfaatan informasi laporan kinerja agar dapat digunakan untuk memberi motivasi dan sebagai dasar melakukan aksi mencapai target kineria kedepan yang lebih baik;
h. Menetapkan keputusan pembentukan tim akuntabilitas dan tim evaluator internal yang diharapkan mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kineria;
i. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kineria;

j. Mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada organisasi dengan memanfaatlkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

Blitar, Januari 2024

Kepala BPKAD Kabupaten Blitar

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BPKAD

KURDIYANTO,SE.,MM
NIP. 197704222002121004